



**PEDOMAN UMUM
PERENCANAAN
PROGRAM/ KEGIATAN
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN TA 2013**



**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2012**

KATA PENGANTAR

Pedoman Umum Perencanaan Program/ Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 merupakan acuan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan prasarana dan sarana pertanian untuk tingkat pusat dan daerah. Pedoman Umum ini disusun untuk mendukung pengembangan kawasan agribisnis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dari aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Untuk memperkuat implementasi *bottom up planning* sekaligus menserasikan dengan *top down policy*, maka pedoman ini menginformasikan berbagai kebijakan Kementerian Pertanian dan Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dapat dipakai sebagai acuan dalam memadukan usulan daerah dan kebijakan pusat dalam penyusunan RKAKL kegiatan prasarana dan sarana pertanian.

Untuk memadu dan menyeragamkan pola penyusunan RKAKL kegiatan prasarana dan sarana pertanian, juga disertakan koridor-koridor penyusunan substansi serta arahan teknis penyusunan RKAKL lingkup Ditjen. PSP.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi perencana di pusat dan di daerah dalam memahami kegiatan prasarana dan sarana pertanian.

Jakarta, April 2012

Direktur Jenderal

Prasarana Dan Sarana Pertanian,



Sumarjo Gatot Irianto

NIP. 19601024 198703 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
II MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	5
2.1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pertanian	5
2.2. Proses Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian	8
III ARAH, KEBIJAKAN, PROGRAM /KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013	15
3.1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian.....	15
3.2. Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.....	18
3.3. Tujuan.....	34
3.4. Sasaran	35

IV	PRIORITAS KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013	36
	4.1. Mendukung Tanaman Pangan	36
	4.2. Mendukung Hortikultura	38
	4.3. Mendukung Perkebunan	39
	4.4. Mendukung Peternakan	40
V	ACUAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013.....	42
	5.1. Koridor Penyusunan Rancangan Kegiatan	42
	5.2. Keterpaduan Kegiatan di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	45
	5.3. Keterpaduan Anggaran APBN dan APBD	48
	5.4. Kriteria Penentuan Lokasi Kabupaten/Kota dan Komoditi.....	50
VI	ACUAN PENYUSUNAN RKAKL KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013.....	52
	6.1. Kodefikasi Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Akun.....	52
	6.2. Harga Satuan Pokok Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (HSPK) Tahun 2013.....	66
VII	KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI LINGKUP DITJEN. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.....	101
	7.1. Kegiatan Kerjasama Luar Negeri.....	101
	7.2. Koridor Penyusunan RKAKL Kegiatan Kerjasama Luar Negeri.....	103

VIII PENUTUP..... 107

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, bahwa perencanaan pembangunan pertanian di pada tahun 2013 didasarkan atas kebijakan Refocusing Alokasi Anggaran 2013, sebagai berikut:

1. Refocusing : Program Prioritas dan Direktif Presiden
2. Refocusing : Komoditas Strategis
3. Refocusing : Wilayah Pembangunan/ Pengembangan
(Cluster/ Kawasan)
4. Refocusing : Jumlah Satker
5. Refocusing : Jenis Kegiatan

Selanjutnya dengan pendekatan perencanaan wilayah, penentuan komoditas dan lokasi berbasis cluster, kriteria serta pengembangan cluster secara terpadu dan multi-years. Kegiatan prasarana dan sarana diarahkan untuk mendukung cluster yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota atau daerah pengembangan baru yang direncanakan di masing-masing wilayah pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Dalam rangka memandu dalam merencanakan dan mengimplementasikan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

prasarana dan sarana pertanian, maka diperlukan Pedoman Umum Perencanaan Program/Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan prasarana dan sarana pertanian baik di pusat maupun di daerah. Pedoman ini dipandang sangat *urgent* mengingat program/kegiatan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan sampai pada tingkat kabupaten, dimana sebagian besar kabupaten yang ada di Indonesia mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah yang cukup besar. Untuk itu diharapkan pedoman ini dapat memberikan arahan (*guidance*) dan sebagai gambaran program/kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2013.

Terkait dengan adanya beberapa ketentuan tersebut diatas, maka dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2013, agar mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Selanjutnya diharapkan akan tercipta persamaan persepsi antara perencana ditingkat pusat dan daerah, sehingga output berupa usulan RKAKL Tahun 2013 telah sesuai dengan berbagai ketentuan yang ada, sinkron dengan kebijakan nasional prasarana dan sarana pertanian, dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Umum ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam merencanakan program/kegiatan prasarana dan sarana pertanian dalam upaya untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian baik antar sub-sektor maupun pusat-daerah.
- c. Menjabarkan program pembangunan prasarana dan sarana pertanian ke dalam kegiatan-kegiatan operasional.
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta memudahkan pencapaian sasaran pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman Umum ini adalah:

- a. Tersusunnya Pedoman Umum Perencanaan Program/ Kegiatan sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan program/kegiatan prasarana dan sarana pertanian.
- b. Terlaksananya koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja prasarana dan sarana pertanian.
- c. Terjabarkannya program prasarana dan sarana pertanian ke dalam kegiatan-kegiatan operasional.

- d. Terjadinya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prasarana dan sarana pertanian.

II. MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pertanian

Sejalan dengan arah Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, maka diperlukan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian perencanaan pembangunan pertanian tetap memperhatikan berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat global dan nasional serta antisipasi terhadap berbagai perubahan kebijakan pembangunan pertanian di daerah. Tahun 2013 merupakan tahun ketiga penerapan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran sehingga diharapkan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah dapat terwujud secara utuh.

Sebagai wujud penerapan sistem penganggaran ini diharapkan agar aspirasi daerah dalam proses perencanaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi daerah terhadap anggaran kinerja, yang kemudian diharapkan meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya perencanaan

tersebut juga diharapkan dapat mencapai sasaran yang bersifat makro yang ditetapkan oleh pusat, sehingga sistem perencanaan yang serasi antara pendekatan *bottom-up planning* dan *top down policy* dapat diwujudkan.

Untuk itu, dalam menyusun perencanaan, para perencana harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan program dengan anggaran kinerja khususnya berkaitan dengan: (a) strategi dan prioritas program yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan pertanian, (b) target *group* (kelompok sasaran) yang akan dituju oleh program dan kegiatan yang ditunjukkan oleh indikator dan sasaran kinerja yang terukur, dan (c) sumber daya dan teknologi yang tersedia dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaan anggaran pembangunan pertanian di daerah pada tahun 2013 adalah melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Kegiatan dekonsentrasi di provinsi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang ditetapkan oleh Gubernur. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada kepala daerah. Kegiatan tugas pembantuan di provinsi dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, dan SKPD tugas pembantuan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati atau walikota.

Adapun mekanisme perencanaan pembangunan pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional pembangunan pertanian (*top-down policy*) sebagai acuan makro terhadap implementasi kegiatan di daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 serta Rencana Kerja Tahunan. Kebijakan tersebut mencakup aspek visi, misi, arah kebijakan, strategi, target dan sasaran nasional, sasaran produksi menurut provinsi, program dan kegiatan serta ukuran indikatornya.
- b. Pemerintah provinsi menjabarkan kebijakan pusat melalui penyusunan program dan kegiatan pengembangan wilayah berbasis komoditas strategis/unggulan di wilayahnya, dengan melibatkan dan memberdayakan kabupaten/kota secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pengembangan aspek di hulu sampai hilir, dan unsur penunjangnya secara *multi-years*.

- c. Pemerintah kabupaten/kota menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di wilayahnya dengan fokus komoditas dan fokus lokasi yang mengacu pada kebijakan nasional dan kapasitas sumberdaya wilayah dan serta mengusulkan secara berjenjang dengan pendekatan *bottom-up planning*. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap: besaran, kualitas dan karakteristik (sumberdaya alam, SDM, modal, teknologi, sosial dan budaya).

2.2. Proses Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian

Tantangan pembangunan pertanian ke depan semakin terasa dengan banyaknya permasalahan dan kendala yang dihadapi baik secara makro maupun teknis operasional kegiatan di lapangan. Hal ini erat kaitannya dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta dukungan besaran anggaran yang tersedia. Mengingat pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembangunan nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja, maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam setiap tahun tetap memberikan perhatian yang besar dalam mendorong pembangunan

pertanian di daerah. Terlebih dengan diimplementasikannya alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disalurkan ke daerah.

Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, program dan kegiatan pembangunan pertanian dijabarkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, dan berbagai tantangan pembangunan pertanian yang dihadapi, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan pertanian merupakan tugas besar dan kompleks, sehingga secara operasional harus melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi dan jaringan kerja dalam memadukan kegiatan pembangunan yang harmonis melalui kerjasama dengan pemanfaatan sumberdaya pada masing-masing pihak. Kemampuan perencana di daerah diupayakan untuk terus ditingkatkan sehingga mampu menggali potensi serta menggunakan potensi tersebut seluas-luasnya. Proses penyusunan rencana

program dan kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

- a. Di tingkat lapangan dilakukan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian. Usulan rencana tersebut berasal dari petani, swasta, dan pemerintah daerah setempat. Usulan tersebut merupakan aspirasi terpadu yang didasari oleh kondisi nyata di lapangan. Penjaringan aspirasi tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Partisipasi dan keterlibatan tersebut dapat berupa ide, pendapat dan saran.
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) di tingkat kabupaten/kota merupakan wahana menyusun rencana program dan kegiatan. Dalam forum Musrenbangtan ini dilakukan analisis terpadu terhadap usulan program maupun kegiatan untuk menghasilkan suatu komitmen bersama mengenai rancangan pembangunan pertanian di tingkat kabupaten/kota. Rancangan pembangunan tersebut mengacu pada Renstrada Kabupaten/Kota. Untuk kesinambungan pembangunan pertanian tersebut perlu memperhatikan keterpaduan subsistem, subsektor dan

sektor terkait, serta sumber-sumber pembiayaan. Rancangan program dan kegiatan yang diusulkan kabupaten/kota agar fokus pada komoditas di lokasi sentra produksi.

Fokus komoditas strategis/unggulan yang dikembangkan secara nasional mencakup **39 jenis komoditas**. Namun demikian diberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan komoditas spesifik lokasi (seperti komoditas pala, sagu, dan lainnya) dengan syarat adanya analisis dan justifikasi yang kuat dari daerah terhadap komoditas spesifik lokasi dimaksud sehingga benar-benar layak untuk dikembangkan. Desain pengembangan komoditas di setiap wilayah tersebut dengan pendekatan cluster (kawasan sentra produksi). Daftar komoditas strategis/unggulan tersebut diusulkan ke provinsi.

Perencanaan di setiap wilayah cluster tersebut dilakukan secara menyeluruh dan *multi-years* dengan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan mencakup **aspek hulu, on-farm, hilir dan jasa penunjangnya**, dapat berupa kegiatan peningkatan produksi (mencakup penyediaan benih/bibit, perbaikan pengelolaan lahan dan air, penyediaan pupuk, penyediaan alsintan, dll), pengolahan dan pemasaran, peningkatan kualitas SDM

dan penyuluhan, serta kegiatan lainnya. Menghitung kebutuhan anggaran berupa nilai rupiah yang akan dibiayai dengan APBN sesuai dengan jenis belanjanya serta dukungan APBD.

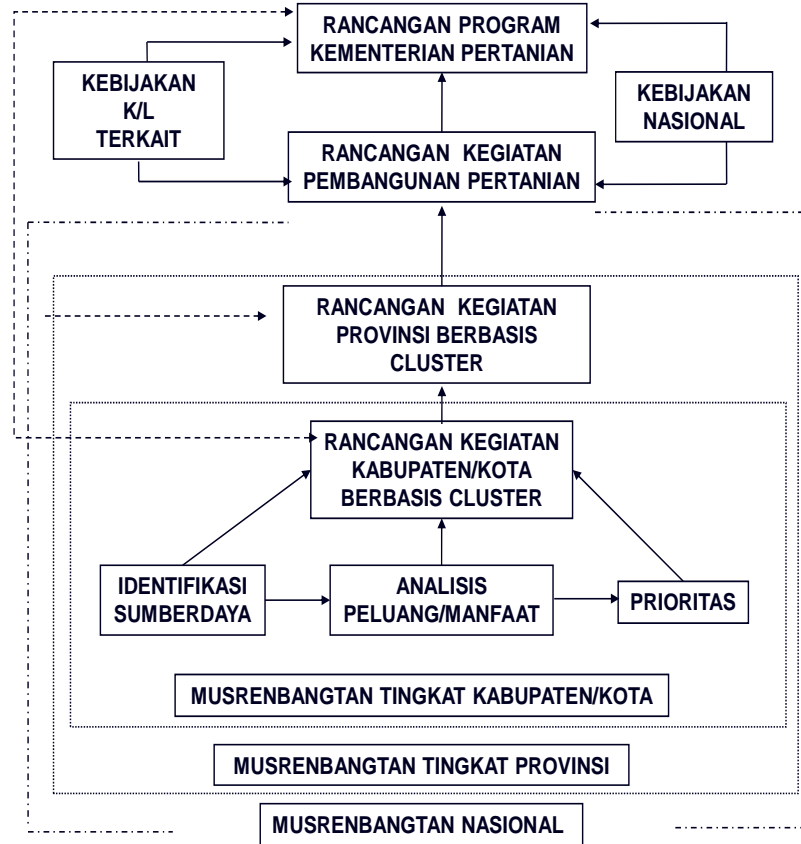
Agar pengembangan komoditas strategis/unggulan dapat dilaksanakan secara terprogram, terkoordinasi dan terpadu, perlu dirancang program penunjangnya secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta potensi sumber daya dan kondisi sosial budaya daerah setempat. Program penunjang tersebut meliputi antara lain: SDM, sarana dan prasarana pertanian, pembiayaan dan investasi pertanian, pengolahan dan pemasaran produk pertanian, serta pemantapan sistem dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) di tingkat provinsi, merupakan wahana menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi. Forum ini membahas usulan dari masing-masing kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan nasional dan Renstrada Provinsi. Untuk memperoleh rancangan pembangunan yang mantap dan terarah perlu melibatkan sub sektor dan sektor terkait, serta sumber-sumber pembiayaan. Pembahasan

difokuskan pada rancangan kegiatan yang terpadu dan *multi-years* lintas kabupaten/kota dengan fokus komoditas di lokasi sentra produksi dengan memilih jenis-jenis kegiatan yang paling prioritas.

- d. Musyarawah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional (Musrenbangtannas), merupakan wahana koordinasi dan sinkronisasi yang mengarah kepada kebijakan nasional dengan mengacu kepada Rencana pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah. Melalui forum ini diperoleh isu-isu pokok pembangunan pertanian di daerah yang selanjutnya dijadikan bahan masukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional ke depan. Di samping itu, di dalam forum ini pula dibahas usulan-usulan pembangunan pertanian dari kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan oleh Gubernur menjadi 1 (satu) usulan Pembangunan Pertanian Provinsi. Proses penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian terangkum dalam **Bagan 2-1**.

Bagan 2-1. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian.



III. ARAH, KEBIJAKAN, PROGRAM /KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013

Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, program/ kegiatan prasarana dan sarana pertanian diarahkan untuk mendukung perwujudan dari sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Pada tahun 2013 program dan kegiatan prasarana dan sarana pertanian diarahkan mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pertanian.

3.1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian

Mulai tahun 2013 pembangunan diarahkan untuk fokus komoditas dan lokasi dengan pendekatan kawasan sentra produksi pertanian. Pendekatan kawasan ini disebut dengan *cluster*. Pendekatan cluster dibangun dengan mengembangkan kawasan yang sudah ada (*existing*) maupun dapat pula mengembangkan kawasan baru. Pengembangan *cluster* ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dengan mengembangkan 39 komoditas strategis dan unggulan nasional, meliputi 30 komoditas pangan dan sembilan komoditas non pangan secara terpadu

dan *multi-years*. Jenis komoditas yang akan dikembangkan antara lain:

- 1). Tanaman pangan tujuh komoditas:
 - Pangan: padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar
- 2). Hortikultura 10 komoditas:
 - Pangan: cabe, bawangmerah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis, salak, sirsak
 - Non pangan: rimpang, tanaman hias
- 3). Perkebunan 15 komoditas:
 - Pangan: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu
 - Non pangan: karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan
- 4). Peternakan tujuh komoditas: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras dan itik.
 - Pangan: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, itik
 - Non pangan: susu

Dari 39 jenis komoditas tersebut, terdapat lima jenis komoditas strategis nasional yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi yang diharapkan dapat mencapai swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung, serta

mencapai swasembada pada 2014 untuk kedelai, tebu dan daging sapi.

Fokus lokasi mencakup wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan lainnya. Kegiatan di dalam lokasi cluster bersifat pengutuhan kegiatan pada kondisi yang sudah ada (*existing*) dengan rancangan program/kegiatan disusun secara terpadu dan *multi-years*. Dalam hal ini perlu dilakukan identifikasi potensi dan kebutuhan kegiatan, serta peluang bagi investor untuk berpartisipasi. Kegiatan swasta yang dapat dibangun antara lain mencakup usaha di bidang perbenihan yang teknologinya belum dikuasai petani, industri alat-mesin, industri pasca panen dan pengolahan, pemasaran, maupun usaha kemitraan dengan petani. Pengembangan *cluster* tersebut diantaranya guna mendukung Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (KPEI).

Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan lima komoditas strategis nasional di kabupaten/kota di lokasi *cluster* melalui penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran dan lainnya.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mensinergikan kegiatannya untuk mendukung pengembangan "*cluster*" tersebut melalui dana APBD maupun sumber

pembiayaan lainnya. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengembangan komoditas lain di luar komoditas strategis nasional melalui dana APBD dan sumber pembiayaan lainnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung semua subsektor dari hulu sampai hilir dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional. Sedangkan pengembangan komoditas unggulan daerah diluar komoditas unggulan nasional tersebut diatas dimungkinkan jika sesuai dengan kebijakan Ditjen Komoditas yang bersangkutan.

3.2. Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Adapun Arah Kebijakan, Strategi dan Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan.

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, ditempuh melalui:
 - a) Penambahan Baku Lahan (PBL)
 - b) Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi

- c) Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat
 - d) Partisipasi dan pemberdayaan petani.
 - e) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
- 2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terkendalinya laju alih fungsi lahan, adalah:
- a) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dan penyiapan, penyusunan serta implementasi peraturan pelaksanaannya, baik berupa PP, Perpres, Kepmen, dll.
 - b) Kebijakan perlindungan kawasan pertanian produktif yang diperlukan untuk mempertahankan lahan-lahan pertanian berkelanjutan, melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait didalam penetapan kawasan dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten (RTRWP/K),
 - c) Kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat petani dalam berpartisipasi untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, melalui pemberdayaan masyarakat petani.
 - d) Kebijakan peningkatan peran institusi terkait dalam pengendalian alih fungsi lahan, melalui peningkatan koordinasi.
- 3) Kebijakan yang terkait dengan pemberian hak kepemilikan lahan petani (sertifikasi) dilakukan melalui:
- a) Koordinasi program dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.

- b) Partisipasi dan pemberdayaan petani terutama dalam pemanfaatan sertifikat sebagai agunan kredit pada sumber permodalan (perbankan), untuk peningkatan permodalan.
- 4) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian:
- a) Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat petani/ peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya serta peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan.
 - b) Kebijakan perbaikan kesuburan lahan sawah melalui pengembangan rumah kompos untuk pemberian/ penambahan bahan organik/kompos.
 - c) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
- 5) Kebijakan pengembangan basis data sumber daya lahan dan air (tabular dan spasial) yang akurat untuk pengembangan dan pengelolaan lahan dan air irigasi pertanian.
- 6) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan sumber air alternatif skala kecil, adalah :
- a) Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik air permukaan maupun air tanah.

- b) Pengembangan sumber air alternatif skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.
- 7) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi, adalah:
- a) Peningkatan fungsi prasarana irigasi,
 - b) Penerapan teknologi hemat air
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat.
- 8) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya konservasi air dan lingkungan hidup, adalah :
- a) Melakukan pemanenan air hujan dan aliran permukaan.
 - b) Fasilitasi pembangunan sarana prasarana konservasi air.
 - c) Melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dalam segala aktivitas pertanian yang terkait dengan sumber daya air.
 - d) Antisipasi kekeringan dan banjir pada kawasan pertanian.
 - e) Peningkatan partisipasi masyarakat/petani.
- 9) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya peningkatan upaya antisipasi perubahan iklim, serta penyebarluasan informasi perilaku iklim adalah:
- a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Instansi terkait dalam informasi tentang prakiraan iklim/cuaca.

- b) Peningkatan diseminasi prakiraan iklim kepada petugas lapangan dan petani.
 - c) Peningkatan pengetahuan petani tentang iklim melalui Sekolah Lapang Adaptasi Perubahan Iklim.
- 10) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dalam rangka pengelolaan air irigasi, adalah :
- a) Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air secara partisipatif dan berbasis pada kearifan lokal.
 - b) Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan pemakai air.
- 11) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya kualitas koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan dan air, adalah:
- a) Pembentukan pokja penanganan masalah lahan dan air
 - b) Peningkatan intensitas forum komunikasi dan kerjasama antar instansi terkait
- 12) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran : meningkatnya kualitas SDM pertanian dalam pengelolaan lahan dan air, adalah:
- a) Peningkatan *capacity building* bagi petugas dan petani
 - b) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
- 13) Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada:
- a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan ;

- b) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN/ CSR ;
 - c) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;
 - d) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat;
 - e) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian ;
 - f) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota) ;
 - g) Pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainnya.
- 14) Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:
- a) Penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
 - b) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
 - c) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian dan non peternakan.
- 15) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal sebagai berikut :
- a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan pada 33 provinsi sebesar 3 - 5 %

adalah: (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan; (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan; (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.

- b) Kebijakan yang terkait dengan terlaksananya project percontohan optimasi pemanfaatan alsintan pada 5 lokasi setiap tahun adalah: (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan percontohan optimasi pemanfaatan alsintan; (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten guna pemantapan kegiatan percontohan; (c) peningkatan partisipasi produsen alsintan dalam mengoptimalkan penggunaan alsintan; (d) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan percontohan optimasi pemanfaatan alsintan.
- c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna di 33 Provinsi: (a) sosialisasi pengawasan alsintan; (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi Petugas Pengawas Alsintan; (c) meningkatkan dukungan sarana pengawasan alsintan.

- d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan Pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional meningkat masing 10%, 10% dan 15% per tahun adalah: (a) sosialisasi Permentan No 25 tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA; (b) Pembentukan Tim UPJA; (c) kebijakan pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA; (d) peningkatan peranan UPJA dalam pengembangan alsintan; (e) kebijakan peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.
- e) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya Pengembangan Bengkel Alsintan di 33 Propinsi: (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan Instansi terkait; (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam pengembangan bengkel; (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.
- f) Kebijakan yang terkait dengan terlaksananya Penguatan UPJA di 33 Propinsi: (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan Instansi terkait; (b) kebijakan bantuan dalam penguatan UPJA; (c) peningkatan kompetensi pengelola UPJA dalam mengembangkan bisnisnya; (d) peningkatan dukungan sarana untuk

penguatan UPJA; (e) peningkatan kualitas layanan UPJA yang profesional.

- g) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pilot percontohan UPJA Mandiri melalui sekolah lapang alsintan di 5 lokasi per tahun: (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan pilot percontohan UPJA Mandiri; (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten guna penetapan lokasi sekolah lapang alsintan; (c) peningkatan partisipasi UPJA dalam mengoptimalkan penggunaan alsintan; (d) kebijakan dalam pengembangan sekolah lapang alsintan; (e) kebijakan dalam memperluas pelayanan jasa alsintan baik dari aspek jumlah maupun luas areal layanan.
- h) Kebijakan yang terkait dengan meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 propinsi adalah kebijakan peningkatan forum komunikasi dan informasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan.

Adapun strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Good Governance

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun

sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4) Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial dan Sekolah Lapang (SL).

5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya

pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.

7) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan *Bankable*, adalah mendorong peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha pertanian.

8) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang risiko kreditnya sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola *risk sharing*.

9) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

10) Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan

pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik ditingkat petani.

- 11) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
- 12) Strategy pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja.
- 13) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung.
- 14) Strategi penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah: Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

- 1) Tersedianya kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air serta perluasan areal.
- 2) Tersedianya standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan lahan dan air serta perluasan areal.
- 3) Terlaksananya bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan dan air serta perluasan areal.
- 4) Luasan (Ha) areal pelayanan irigasi, area pengelolaan lahan dan area pertanian baru.
- 5) Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha.
- 6) Terealisasi penyaluran kredit program KKP-E, kredit pembibitan sapi bersubsidi, KUR, dan pembiayaan usaha tani melalui laba BUMN.
- 7) Tersedianya rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian dan non pertanian.

- 8) Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian.
- 9) Terlaksananya pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- 10) Terlaksananya pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- 11) Tersedianya kebijakan di bidang alat dan mesin pertanian.
- 12) Tersedianya standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang alat dan mesin pertanian.
- 13) Terlaksananya bimbingan teknis di bidang alat dan mesin pertanian.
- 14) Jumlah unit alsintan yang digunakan, luasan (Ha) areal yang dikerjakan menggunakan alsintan, jumlah petugas pengawas alsintan dan jumlah UPJA/Bengkel Alsintan yang operasional.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan

lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (*jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga*), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian, maka pembangunan pertanian khususnya target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian.

Tantangan pembangunan pertanian kedepan dari aspek prasarana dan sarana pertanian antara lain bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburuan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut

hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Berikut ini secara garis besar diuraikan tujuan dan sasaran kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA. 2013.

3.3. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA. 2013 adalah sbb:

1. Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
2. Mengendalikan laju alih fungsi lahan
3. Mendayagunakan lahan pertanian terlantar
4. Penguatan hak atas tanah
5. Melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi
6. Melakukan upaya optimasi pemanfaatan dan rehabilitasi prasarana jaringan air irigasi
7. Melakukan upaya konservasi air
8. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan pengelola air
9. Meningkatkan koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan dan air
10. Meningkatkan kualitas SDM pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian

3.4. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya luas areal pertanian dan intensitas pertanaman (pada komoditas semusim) pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
2. Terkendalinya laju alih fungsi lahan
3. Terwujudnya pendayagunaan lahan pertanian terlantar
4. Meningkatnya penguasaan hak atas tanah
5. Tercapainya pengembangan sumber air irigasi
6. Tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi
7. Terwujudnya konservasi air
8. Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan pengelola air
9. Terwujudnya peningkatan koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan dan air
10. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian

IV. PRIORITAS KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013

Prioritas kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA 2013 adalah tersedianya prasarana dan sarana pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung pementapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Adapun prioritas kegiatan prasarana dan sarana pertanian secara rinci mendukung per aspek pertanian adalah sbb:

4.1. Mendukung Tanaman Pangan

Prioritas kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian TA 2013 dalam mendukung produksi tanaman pangan terefleksi dari berbagai aspek sbb:

1. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

- a. Pengembangan Jaringan Irigasi
- b. Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru
- c. Pemberdayaan Kelembagaan

2. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- a. Pengembangan Optimasi Lahan
- b. Pengembangan Optimasi Lahan Kerjasama TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP)
- c. Perluasan Sawah

- d. Perluasan Sawah Kerjasama TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP)
- e. Pengembangan Metode SRI
- f. Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
- g. Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
- h. Sosialisasi 4 Peraturan Pemerintah

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi
- b. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Kab/Kota
- c. Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi
- d. Pendampingan Penyusunan RDKK Tingkat Kab/Kota
- e. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
- f. Bantuan Langsung Pupuk (BLP)

4. Aspek Pembiayaan

- a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM - PUAP)
- b. Operasional PUAP (Provinsi)
- c. Operasional Pembiayaan/PUAP Kab/Kota
- d. Pengembangan Asuransi Pertanian (Provinsi)

5. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan Traktor Roda 2
- b. Bantuan Pompa Air

- c. Bantuan Rice Transplanter
- d. Penumbuhan UPJA Mandiri
- e. Operasi Pengembangan, Pengawasan, dan Kelembagaan Alsintan

4.2. Mendukung Hortikultura

Prioritas kegiatan kerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun anggaran 2013 dalam mendukung produksi tanaman hortikultura terefleksi dari berbagai aspek sbb:

1. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

- a. Pengembangan Sumber Air
- b. Pengembangan Embung
- c. Pemberdayaan Kelembagaan

2. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- a. Jalan Pertanian
- b. Pengembangan Optimasi Lahan
- c. Perluasan Areal Hortikultura
- d. Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
- e. Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

4. Aspek Pembiayaan Pertanian

- a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM - PUAP)
- b. Operasional PUAP (Provinsi)

- c. Operasional Pembiayaan/PUAP Kab/Kota

5. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan Pompa Air

4.3. Mendukung Perkebunan

Prioritas kegiatan kerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun anggaran 2013 dalam mendukung produksi tanaman perkebunan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

- a. Pengembangan Sumber Air
- b. Pengembangan Embung
- c. Pemberdayaan Kelembagaan

2. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- a. Jalan Pertanian
- b. Pengembangan Optimasi Lahan
- c. Perluasan Areal Perkebunan
- d. Perluasan Areal Tebu
- e. Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
- f. Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

4. Aspek Pembiayaan Pertanian

- a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM - PUAP)
- b. Operasional PUAP (Provinsi)
- c. Operasional Pembiayaan/PUAP Kab/Kota

5. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan Traktor Roda 4

4.4. Mendukung Peternakan

Prioritas kegiatan kerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun anggaran 2013 dalam mendukung produksi peternakan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Aspek Pengelolaan Air Irigasi

- a. Pengembangan Sumber Air
- b. Pengembangan Embung
- c. Pemberdayaan Kelembagaan

2. Aspek Pengelolaan Lahan

- a. Jalan Pertanian
- b. Pengembangan Optimasi Lahan
- c. Perluasan Areal Peternakan
- d. Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
- e. Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian

3. Aspek Pupuk dan Pestisida

- a. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
- b. Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)

4. Aspek Pembiayaan Pertanian

- a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM - PUAP)
- b. Operasional PUAP (Provinsi)
- c. Operasional Pembiayaan/PUAP Kab/Kota

5. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

- a. Bantuan Chopper

**V. ACUAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2013**

5.1. Koridor Penyusunan Rancangan Kegiatan

Dalam menyusun rancangan kegiatan prasarana dan sarana pertanian, perencana di tingkat pusat dan daerah agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang diusulkan pada TA. 2013 agar mengacu pada kegiatan prioritas prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung cluster komoditi unggulan/ strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang telah digariskan.
2. Kegiatan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan dengan pola padat karya, Bantuan Sosial (Bansos), swakelola dan kontraktual, dengan contoh aplikasi RKAKL untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus mengikuti pola yang telah digariskan. Kegiatan yang telah digariskan dengan pola Bantuan Sosial maka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus mengikuti pola yang telah digariskan melalui pola bantuan sosial.

4. Kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang difasilitasi dana Tugas Pembantuan adalah kegiatan fisik dan yang bersifat non fisik, misalnya: administrasi kegiatan, pelaporan, perjalanan, honor, koordinasi. Alokasi dana non fisik dari APBN adalah alokasi minimal yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Jika dalam pelaksanaan di lapangan dipandang perlu dukungan sinergis program dari APBD, maka diperkenankan mengalokasikan dana sinergis program seperlunya dari APBD sesuai kebutuhan di lapangan dan sesuai dengan kemampuan APBD masing-masing (agar tidak memberatkan/membebani APBD).
5. Agar tidak mengusulkan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian, misalnya: pengembangan informasi pasar, dll.
6. Agar mengakomodir biaya perjalanan dalam rangka menghadiri pertemuan dan kegiatan berskala nasional lingkup Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2013.
7. Pada TA. 2013 terdapat kegiatan-kegiatan prioritas yang perlu ditampung di daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing

daerah dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan kesiapan sumberdaya aparat daerah.

8. Kegiatan yang diusulkan pada TA. 2013 agar disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas di masing-masing daerah.
9. Komponen kegiatan yang diusulkan harus logis mendukung pencapaian output, dan dapat memberikan manfaat (Benefit) item/jenis pengeluaran yang tidak relevan dengan output kegiatan tidak diperkenankan.
10. Dalam penyusunan RKAKL/DIPA hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, hemat, dan menghindari pengeluaran yang berlebihan agar pemanfaatan anggaran pembangunan lebih optimal untuk pencapaian sasaran kegiatan.
11. Untuk penerapan azas "rewards and punishment" sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparat perlu diperhatikan dalam pengalokasian anggaran. Kabupaten/Kota yang kinerja pelaksanaan dan pelaporannya tidak baik agar tahun berikutnya tidak dialokasikan anggaran atau dilakukan pengurangan anggaran, sebaliknya Kabupaten/Kota yang kinerja pelaksanaan dan pelaporannya baik dapat dinaikkan anggarannya.

12. Sebagai kelengkapan dalam pembahasan anggaran di Ditjen. Anggaran (Kementerian Keuangan) agar disertakan berbagai data dukung yang diperlukan antara lain: TOR atau proposal kegiatan usulan daerah yang dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB)/ Analisa Biaya, Foto/Denah Lokasi, Spesifikasi Teknis, HSPK, Price List, SK-SK (SK Bupati, dll) dan data dukung lain yang dipandang perlu.

5.2. Keterpaduan Kegiatan di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Struktur kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian pada TA. 2013 disusun berdasarkan pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja secara hierarkis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Kegiatan prasarana dan sarana pertanian secara nasional menjadi tanggung jawab satuan kerja (satker) pusat yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam perencanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam skope nasional.

Pokok kegiatannya mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan monev terhadap kegiatan terkait di seluruh Provinsi. Sedangkan kegiatannya difokuskan pada : "Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian", dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah penanggungjawab/ koordinator pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian secara nasional (provinsi seluruh Indonesia), bertugas sebagai koordinator Satker Dinas Pertanian/ Perkebunan/Peternakan di Provinsi dalam melaksanakan kegiatan prasarana dan sarana pertanian.

2. Tingkat Provinsi

Dalam perencanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian, Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) di Tingkat Provinsi bertindak sebagai koordinator kabupaten/kota di provinsinya, sesuai bidangnya masing-masing (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan).

Kegiatan pokok prasarana dan sarana pertanian ada di Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Provinsi mencakup penyiapan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di kabupaten/kota. Dalam rangka pembinaan teknis sesuai kebutuhan daerah, maka Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan provinsi dimungkinkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat percontohan lintas kabupaten/kota.

Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan di Provinsi adalah pendamping pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, bertugas sebagai koordinator Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam perencanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian, Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) di Tingkat Kabupaten/Kota bertindak sebagai perencana kegiatan di tingkat lapangan, sesuai bidangnya masing-masing (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan).

Kegiatan pokok prasarana dan sarana pertanian ada di Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/ Peternakan kabupaten/kota mencakup penyiapan petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di tingkat lapangan.

Satker Dinas Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan di Kabupaten/ Kota adalah penanggungjawab/ koordinator kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di wilayahnya, bertugas sebagai pelaksana/ mendampingi petani dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di tingkat lapangan.

5.3. Keterpaduan Anggaran APBN dan APBD

Seperti halnya pada tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian akan mengalokasikan dana dekonsentrasi untuk tingkat provinsi dan dan tugas pembantuan untuk tingkat kabupaten kota.

Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk kegiatan prasarana dan sarana pertanian di tingkat provinsi dipergunakan untuk pembinaan, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan / kegiatan lintas kabupaten / kota diwilayahnya (non fisik). Sedangkan pemanfaatan dana tugas pembantuan di tingkat kabupaten / kota untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan (fisik) beserta dana non fisik untuk operasional kegiatan.

Karena alokasi dana non fisik dari dana tugas pembantuan (APBN) adalah alokasi minimal yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Jika dalam pelaksanaan di lapangan dipandang perlu dukungan sinergis program dari APBD, maka diperkenankan mengalokasikan dana sinergis program dari APBD sesuai kebutuhan di lapangan dan sesuai dengan kemampuan APBD masing-masing (agar tidak memberatkan/membebanikan APBD).

Dengan demikian, pemanfaatan dana APBN dan APBD diharapkan saling mendukung pada fokus kegiatan yang sama, sehingga diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian di daerah.

5.4. Kriteria Penentuan Lokasi Kabupaten/ Kota dan Komoditi

Untuk menentukan Kabupaten/Kota dan komoditi yang perlu didukung kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2013 ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota dan komoditi yang diusulkan masuk dalam usulan Musrenbangtan yang ditandatangani oleh Gubernur.
2. Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk mendapat dukungan anggaran dan kegiatan prasarana dan sarana pertanian tersebut merupakan wilayah pengembangan komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dari masing-masing provinsi.
3. Kabupaten/kota tersebut telah menyampaikan proposal ke Ditjen PSP.
4. Prestasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2006 s/d 2012 dinilai cukup baik (penerapan *reward and punishment*).
5. Indeks Fiskal Kabupaten/Kota ybs rendah ($<1,00$), artinya kabupaten/ kota tersebut dipandang perlu mendapat bantuan dari pusat
6. Kabupaten/Kota penerima dana tugas pembantuan bersedia menyiapkan dana pendukung dari APBD secukupnya.

7. Pertimbangan kesiapan daerah, khususnya kesiapan SDM (petugas dan petani), kesiapan lokasi (teknis, sosial, budaya) dan dinilai layak untuk lokasi prasarana dan sarana pertanian.

Dengan melihat kriteria tersebut, serta berdasarkan hasil penilaian dengan mempertimbangkan Kebijakan Nasional yang dipandang strategis maka dipilih kabupaten/kota dan komoditi yang perlu didukung kegiatan prasarana dan sarana pertanian melalui dana tugas pembantuan.

VI. ACUAN PENYUSUNAN RKAKL KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013

6.1. Kodefikasi Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Akun

Agar dalam menyusun RKAKL kegiatan prasarana dan sarana pertanian ada keseragaman, maka perencana di tingkat pusat dan daerah agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kode 018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Seperti halnya pada tahun 2012, maka pada tahun 2013 alokasi anggaran dan kegiatan di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian baik yang ada di tingkat pusat, di tingkat provinsi (dekonsentrasi), maupun Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota hanya ada 1 program, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08.11), antara lain sbb:

1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

- 1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - 1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - 3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
3. Kode Output Kegiatan di lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sbb:
- 1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
 - 001 Pengembangan Sumber Air (Paket)
 - 004 Layanan administrasi bidang pengelolaan air (Laporan)
 - 005 Dokumen Perencanaan & Pengelolaan Anggaran (Dokumen)
 - 006 Laporan kegiatan dan pembinaan (Laporan)
 - 007 Pengadaan alat komunikasi dan audio visual (Unit)
 - 008 Kendaraan (Unit)

- 009 Sarana dan Prasarana (Unit)
- 010 Pengembangan Irigasi Tanah Dalam (Unit)
- 011 Pengembangan Irigasi Partisipatif (Unit)
- 012 Proyek Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pertanian Pasca Tsunami di propinsi NAD (Paket)
- 013 NTB Water Resource Management Program (NTB-WRMP) (Paket)
- 014 Participatory Irrigation Sector Project (PISP) (Paket)
- 015 Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Paket)
- 017 Pembinaan Pengembangan Sumber Air (Paket)
- 018 Pembinaan Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air (Paket)
- 019 Pembinaan Kelembagaan (Paket)
- 020 Pembinaan Kegiatan Iklim, Konservasi air dan Lingkungan Hidup (Paket)
- 021 Pengembangan Irigasi Perpipaan (Paket)

- 022 Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Paket)
- 023 Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)
- 024 Pemberdayaan Kelembagaan (Paket)
- 1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - 002 Pengembangan Optimasi Lahan (Ha)
 - 003 Konservasi DAS Hulu (Ha)
 - 004 Pengembangan Metode SRI (Ha)
 - 006 Pengembangan Jalan Pertanian (Km)
 - 007 Tersedianya data spasial luas baku lahan sawah (Paket)
 - 008 MIFEE (Paket)
 - 009 Layanan administrasi bidang perluasan dan pengelolaan lahan (Paket)
 - 010 Dokumen Perencanaan & Pengelolaan Anggaran (Dokumen)
 - 011 Laporan kegiatan & Pembinaan (Laporan)
 - 012 Pengadaan alat komunikasi dan audio visual (Unit)

- 013 Kendaraan (Unit)
- 014 Sarana dan Prasarana (Unit)
- 015 Integrated Citarum Water Resource management Irrigation (ICWRMIP) (Paket)
- 016 Consolidated Farming (Paket)
- 017 Pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) (Paket)
- 018 Pengendalian Lahan (Paket)
- 019 audit lahan (Paket)
- 020 Pendampingan Cetak Sawah (Paket)
- 021 Unit Pengolah Pupuk Organik (Unit)
- 022 Pembinaan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan (Paket)
- 023 Pengembangan Basis Data Lahan (Paket)
- 024 Pembinaan Perluasan kawasan tanaman pangan (Paket)
- 025 Pembinaan Perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan (Paket)
- 026 Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian (Paket)

- 027 Perluasan Sawah (Ha)
- 028 Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/
Pternakan (Ha)
- 1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan
Alat Mesin Pertanian
 - 001 Bantuan RPPO, Bantuan Traktor R-2 dan R-
4 serta Bantuan Pompa Air (Unit)
 - 002 Roadmap (Paket)
 - 004 Layanan administrasi bidang alat dan mesin
pertanian (Paket)
 - 005 Dokumen Perencanaan & Pengelolaan
Anggaran (Dokumen)
 - 006 Laporan kegiatan & Pembinaan (Laporan)
 - 007 Pengadaan alat komunikasi dan audio
visual (Unit)
 - 008 Kendaraan (Unit)
 - 009 Sarana dan Prasarana (Unit)
 - 010 Perluasan Lahan Perkebunan (Ha)
 - 011 Perluasan Lahan HMT dan Padang
Penggembalaan (Ha)

- 013 Pengembangan alat dan mesin pertanian
(Unit)
- 014 Pengawasan dan peredaran alsintan
(Paket)
- 016 Alsintan Tanaman Pangan (Unit)
- 017 Alsintan Hortikultura (Unit)
- 018 Alsintan Perkebunan (Unit)
- 019 Alsintan Peternakan (Unit)
- 020 Pengembangan UPJA Mandiri (Paket)
- 021 Operasional Pengembangan, Pengawasan,
dan Kelembagaan Alsintan (Paket)
- 022 Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL)
Traktor Roda 2 (Unit)
- 023 Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL)
Traktor Roda 4 (Unit)
- 024 Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL)
Pompa Air (Unit)

- 1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
- 002 Layanan perkantoran (Bulan)
 - 003 Layanan Administrasi Perkantoran Umum
(Tahun)
 - 004 Dokumen Perencanaan & Pengelolaan
Anggaran (Dokumen)
 - 005 Laporan kegiatan & Pembinaan (Laporan)
 - 006 Pengadaan alat komunikasi dan audio
visual (Unit)
 - 007 Pengadaan kendaraan (Unit)
 - 008 Sarana dan Prasarana (Unit)
 - 009 Percontohan pengembangan prasarana dan
sarana Pertanian (Paket)
 - 010 Laporan kegiatan/satker data statistik, SAI
dan SIMONEV (Laporan)
 - 011 Pengadaan mebelair (Unit)
 - 012 Pengadaan alat pengolah data (Unit)
 - 013 Rehab gedung (Unit)
 - 014 Rehab sarana, prasarana dan peralatan

perkantoran (Unit)

015 Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan
(NSPK) yang dihasilkan dan atau
dikembangkan (Dokumen)

994 Layanan Perkantoran (Bulan layanan)

3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida

- 001 Tersusunnya kebijakan subsidi Pupuk (Paket)
- 002 Roadmap (Paket)
- 003 Pembangunan Rumah Kompos (Unit)
- 004 Layanan administrasi bidang pupuk dan pestisida (Paket)
- 005 Dokumen Perencanaan & Pengelolaan Anggaran (Dokumen)
- 006 Laporan kegiatan dan pembinaan (Laporan)
- 007 Pengadaan alat komunikasi dan audio visual (Unit)
- 008 Kendaraan (Unit)
- 009 Sarana dan Prasarana (Unit)
- 010 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) (Unit)
- 011 Fasilitas pupuk anorganik (Paket)
- 012 Fasilitas pestisida untuk pertanian (Paket)
- 013 Pengawasan pupuk dan pestisida

(Kabupaten)

- 014 Pengembangan Pupuk an organik (Paket)
- 015 Pengembangan Pupuk organik dan
Pembenah tanah (Paket)
- 016 Pengembangan Pestisida kimia dan hayati
(Paket)
- 017 Pendampingan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi (Paket)
- 018 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk
Pestisida (KP3) (Paket)
- 019 Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida
(Paket)
- 020 Skrening Pestisida (Unit)
- 021 Pendampingan Penyaluran Bantuan
Langsung Pupuk (Paket)
- 022 Kajian Pestisida Terdaftar dan Beredar
(Paket)

- 3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
- 001 Model Pembiayaan Bersubsidi (Model)
 - 002 Kelembagaan Pembiayaan Pertanian (LKMA)
 - 003 Pembinaan dan pemantau Fasilitator Petani (FPT)
 - 004 Penguatan modal Gapoktan PUAP (Gapoktan)
 - 005 Kebijakan Pembiayaan Pertanian (Paket)
 - 006 Layanan administrasi bidang pembiayaan pertanian (Paket)
 - 007 Dokumen Perencanaan & Pengelolaan Anggaran (Dokumen)
 - 008 Laporan kegiatan dan pembinaan (Laporan)
 - 009 Pengadaan alat komunikasi dan audio visual (Unit)
 - 010 Kendaraan (Unit)

- 011 Sarana dan Prasarana (Unit)
- 012 Penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR) (Dokumen)
- 013 Fasilitasi pemanfaatan sumber pembiayaan syariah dan komersial untuk sub sektor pertanian (Dokumen)
- 015 Pengembangan sentra usaha pertanian dengan pembiayaan pertanian (Dokumen)
- 016 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Paket)
- 017 Operasional PUAP (Paket)
- 018 Pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis (Paket)
- 019 Pembinaan Pembiayaan Program (Paket)
- 020 Pembinaan Pembiayaan Syariah dan kerjasama (Paket)
- 021 Pembinaan Pembiayaan Agribisnis (Paket)
- 022 PUSO (Paket)
- 023 Operasional PUSO (Paket)
- 024 Penyaluran dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)

Catatan: Jika dalam Petunjuk Teknis Penyusunan DIPA terjadi perubahan kodefikasi, maka kode yang dipakai dapat disesuaikan, dengan prinsip-prinsip pengelompokan yang sama. Output pembinaan agar dipakai untuk dekonsentrasi, sedangkan output fisik untuk Kabupaten/Kota.

3. Adapun Akun yang dapat digunakan untuk kegiatan prasarana dan sarana pertanian antara lain sbb:

- 521211 Belanja Bahan
- 521213 Honor output kegiatan
- 522151 Belanja Jasa Profesi
- 522191 Belanja Jasa Lainnya
- 524119 Belanja perjalanan lainnya
- 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang
- 576111 Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang

Dalam menyusun akun diperlukan entry kode KPPN (d disesuaikan dengan KPPN terdekat) dan kode lokasi (d disesuaikan dengan kabupaten/kota ybs).

4. Group Akun dan Detail Akun

Jika dalam satu sub kegiatan terdapat lebih dari satu item pengeluaran/ kegiatan maka penulisannya menggunakan group Akun (urutan A,B,C dst). Detail Akun merupakan item pengeluaran pada setiap Group Akun, isinya harus relevan dengan judul Group Akun yang bersangkutan.

6.2. Harga Satuan Pokok Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (HSPK) Tahun 2013

Untuk menyusun harga satuan (unit cost) kegiatan prasarana dan sarana pertanian maka sebagai acuan penyusunan RKAKL dipergunakan daftar sbb:

**MENU KEGIATAN DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN 2013**

NO.	ASPEK/ KEGIATAN	UNIT COST (Rp.)
I. Aspek Pengembangan Air Irigasi		
1	Pengembangan Jaringan Irigasi	1.000.000 / Ha
2	Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru	1.000.000 / Ha
3	Pemberdayaan Kelembagaan	80.000.000 / Pkt
4	Pengembangan Sumber Air **)	60.000.000 / Pkt
5	Pengembangan Embung **)	60.000.000 / Pkt
II. Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan		
1	Pengembangan Jalan Pertanian **)	100.000.000 / Km
2	Pengembangan Optimasi Lahan	2.100.000 / Ha
3	Pengembangan Optimasi Lahan Kerjasama TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP)	2.100.000 / Ha
4	Pengembangan Metode SRI	2.100.000 / Ha
5	Perluasan Sawah	10.000.000 / Ha
6	Perluasan Sawah Kerjasama TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP)	10.000.000 / Ha
7	SID Perluasan Sawah	300.000 / Ha
8	Perluasan Areal Hor/Bun/Nak	7.000.000 / Ha
9	Perluasan Areal Tebu	10.000.000 / Ha
10	Pra Sertifikasi Lahan Pertanian	10.000.000 / Pkt
11	Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian	10.000.000 / Pkt
12	Sosialisasi 4 Peraturan Pemerintah	52.400.000 / Pkt
13	MIFEE	25.000.000.000 / Pkt
III. Aspek Pupuk dan Pesticida		
1	Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KP3) Tingkat Provinsi *)	/ PKT
2	Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KP3) Tingkat Kab/Kota	91.660.000 / PKT
3	Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi *)	/ PKT
4	Pendampingan Penyusunan RDKK Tingkat Kab/Kota	100.000.000 / PKT
5	Pengembangan Pupuk Organik	
	a. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	186.000.000 / Unit
	b. Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)	100.000.000 / Unit
	c. Bantuan Langsung Pupuk (BLP)	100.000.000.000 / Pkt
IV. Aspek Pembiayaan Pertanian		
1	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	
	a. Pengembangan Asuransi Pertanian (Provinsi)	100.000.000 / Pkt
	b. Operasional Pembiayaan/PUAP Kab/Kota	25.000.000 / Pkt
2	Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	
	a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM - PUAP)	100.000.000 / Gpktan
	b. Operasional Puap (Provinsi)	50.000.000 / Pkt
	c. Penyelia Mitra Tani (PMT)	48.000.000.000 / Pkt
3	Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) ***)	
V. Aspek Alat dan Mesin Pertanian		
1	Bantuan Alsintan	
	a. Bantuan traktor roda 2	25.000.000 / Unit
	b. Bantuan traktor roda 4	600.000.000 / Unit
	c. Bantuan Pompa Air	20.000.000 / Unit
	d. Bantuan Rice Transplanter	90.000.000 / Unit
	e. Bantuan Chopper	30.000.000 / Unit
2	Penumbuhan UPJA Mandiri	200.000.000 / Unit
3	Operasional Pengembangan, Pengawasan dan Kelembagaan Alsintan	100.000.000 / Pkt

*) Besaran sesuai Alokasi Per Propinsi

**) Untuk Sub Sektor Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan

***) Menunggu Peralihan dari BA.99 ke 018

**CONTOH APLIKASI PENGISIAN RKAKL 2013 PADA KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN:**

Pengisian kegiatan pada RKAKL TA. 2013 agar mengacu pada cluster/ komoditas unggulan/ strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

A. Mendukung Tanaman Pangan

1. Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan Jaringan Irigasi: Rp. 1 jt/ Ha

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.023	PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI Lokasi:	2 Ha		2.000.000
1794.023.001	PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI Mendukung Tanaman Pangan Jumlah Komponen Utama			1.000.000
	011 Pengembangan Jaringan Irigasi Mendukung Tanaman Pangan Padi			1.000.000
	A) <i>Pengembangan Jaringan Irigasi Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.</i>			1.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			1.000.000
	00.00. 1 - Rehab/ Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi dan Insentif Kerja	1 Ha	1.000.000	1.000.000
1794.023.002	PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH BARU Mendukung Tanaman Pangan Jumlah Komponen Utama			1.000.000
	011 Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru Mendukung Tanaman Pangan Padi			1.000.000
	A) <i>Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.</i>			1.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			1.000.000
	00.00. 1 - Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi dan Insentif Kerja	1 Ha	1.000.000	1.000.000

b. Pemberdayaan Kelembagaan: Rp. 80 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.024	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN	1 Pkt		80.000.000
	Lokasi:			
1794.024.001	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN P3A Mendukung Tanaman Pangan			80.000.000
	Jumlah Komponen Utama			80.000.000
	011 Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Tanaman Pangan Padi			1.600.000
	A) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.			1.600.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1.600.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka PSETK/ Penelusuran Jaringan (1 hari x 30 org)	30 OH	25.000	750.000
	00.00. 2 - Peralatan Pelaksanaan PSETK	1 PKT	350.000	350.000
	00.00. 3 - Penggandaan dan Penyusunan Laporan PSETK	1 PKT	500.000	500.000
	012 Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Tanaman Pangan Padi			17.400.000
	A) Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.			17.400.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			5.600.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - ATK dan Bahan Komputer	1 PKT	750.000	750.000
	00.00. 2 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka pelatihan penguatan kelembagaan (2 hari x 35 Org)	70 PKT	25.000	1.750.000
	00.00. 3 - Fotocopy, dokumentasi dan lain - lain (20 lbr x 25 Org x 2 hari)	1.000 LBR	200	200.000
	00.00. 4 - Display/Alat Peraga/Modul/dll	1 PKT	900.000	900.000
	00.00. 5 - Perlengkapan Peserta	25 ORG	60.000	1.500.000
	00.00. 6 - Penggandaan dan Penyusunan Laporan	1 PKT	500.000	500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>			3.700.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Honor Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	250.000	2.500.000
	00.00. 2 - Honor Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	200.000	1.200.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			4.800.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Honor Narasumber/Instruktur	16 OJ	300.000	4.800.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			3.300.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Penggantian Transport Narasumber/Instruktur (2 org x 2 hari)	4 OH	150.000	600.000
	00.00. 2 - Penggantian Transport Petugas/Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	100.000	1.000.000
	00.00. 3 - Penggantian Transport Peserta (25 org x 2 hari)	50 OH	25.000	1.250.000
	00.00. 4 - Penggantian Transport Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	75.000	450.000
	013 Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Tanaman Pangan Padi			1.000.000
	A) Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.			1.000.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			1.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A	1 PKT	1.000.000	1.000.000
	014 Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Tanaman Pangan Padi			60.000.000
	A) Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.			60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>			60.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Bahan Material Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)	1 Unit	60.000.000	60.000.000

2. Perluasan dan Pengelolaan Lahan

a. Pengembangan Optimasi Lahan: Rp. 2,1 jt/ Ha

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.002	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN Lokasi:	120 Ha		258.000.000
1795.002.001	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN Mendukung TANAMAN PANGAN Jumlah Komponen Utama			42.000.000
	011 Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Padi			42.000.000
	A) <i>Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.</i>			42.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			300.000
	00.00.1 - Bantuan Transport Tim Teknis	3 OH	100.000	300.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			200.000
	00.00.1 - Pengawalan / Sosialisasi	1 Pkt	200.000	200.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			41.500.000
	00.00.1 - Saprotan dan Insentif Kerja	20 Ha	2.075.000	41.500.000
1795.002.002	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN Mendukung TANAMAN PANGAN KERJASAMA TNI AD Mendukung KETAHANAN PANGAN (TMKP) Jumlah Komponen Utama			216.000.000
	011 Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Jagung			216.000.000
	A) <i>Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Jagung di Kab.</i>			216.000.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			75.000.000
	00.00.2 - Insentif Penyiapan lahan dan penanaman	100 Ha	750.000	75.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			2.000.000
	00.00.1 - Bantuan Transport Tim Teknis	10 OH	100.000	1.000.000
	00.00.2 - Bantuan Perjalanan dalam Rangka Pengawalan dan Partisipasi Aparat	10 OH	100.000	1.000.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			6.500.000
	00.00.1 - Pengawalan /Sosialisasi	10 Pkt	150.000	1.500.000
	00.00.2 - Kegiatan Terkait Pengadaan	1 Pkt	5.000.000	5.000.000
526115	<u>Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Permda</u> (KPPN.....)			132.500.000
	00.00.1 - Saprotan	100 Ha	1.325.000	132.500.000

NB: 1. Perhitungan kegiatan optimasi lahan dilakukan untuk setiap kelipatan 20 Ha

2. Perhitungan kegiatan optimasi lahan kerjasama TMKP dilakukan untuk setiap kelipatan 10 Ha dan terdapat beberapa alokasi anggaran khusus

b. Perluasan Sawah: Rp. 10 jt/ Ha
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.027	PERLUASAN SAWAH Lokasi:	6 Ha		61.600.000
1795.027.001	PERLUASAN SAWAH Mendukung TANAMAN PANGAN Jumlah Komponen Utama			10.000.000 10.000.000
011	Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi			10.000.000
A)	Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.....			10.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			10.000.000
00.00.1	- Perluasan Sawah	1 Ha	10.000.000	10.000.000
1795.027.002	PERLUASAN SAWAH Mendukung TANAMAN PANGAN KERJASAMA TNI AD Mendukung KETAHANAN PANGAN (TMKP) Jumlah Komponen Utama			51.600.000 51.600.000
011	Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi			51.600.000
A)	Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.....			51.600.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			1.500.000
00.00.1	- Dukungan Operasional Peralatan dan Perlengkapan Pendukung untuk Kegiatan Perluasan Sawah	5 Ha	300.000	1.500.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			100.000
00.00.1	- Bantuan Perjalanan dalam Rangka Pengawasan dan Partisipasi Aparat	1 OH	100.000	100.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			50.000.000
00.00.1	- Perluasan Sawah	5 Ha	10.000.000	50.000.000

NB: 1. Perhitungan kegiatan Perluasan sawah kerjasama TMKP dilakukan untuk setiap kelipatan 5 Ha dan terdapat beberapa alokasi anggaran khusus

c. SID Perluasan Sawah: Rp. 300.000/ Ha
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.020	PENDAMPINGAN CETAK SAWAH Lokasi:	6 Ha		300.000
1795.020.001	OPERASIONAL PERLUASAN SAWAH Jumlah Komponen Utama			300.000 300.000
011	Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi			300.000
A)	<i>SID Perluasan Sawah</i>			300.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.....)			300.000
	00.00. 1 - SID Perluasan Sawah	1 Ha	300.000	300.000

d. Pengembangan Metode SRI: Rp. 2,1 jt/ Ha
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.004	PENGEMBANGAN METODE SRI Lokasi:	20 Ha		42.000.000
1795.004.001	PENGEMBANGAN METODE SRI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN Jumlah Komponen Utama			42.000.000 42.000.000
011	Pengembangan Metode SRI Mendukung Tanaman Pangan Padi			42.000.000
A)	<i>Pengembangan Metode SRI Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.</i>			42.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			100.000
	00.00. 1 - Fotocopy dan Sarana Penunjang	1 Pkt	100.000	100.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			1.300.000
	00.00. 1 - Bantuan Transport Pendamping	8 OH	100.000	800.000
	00.00. 2 - Bantuan Transport Tim Teknis	5 OH	100.000	500.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			600.000
	00.00. 1 - Penyelenggaraan Pelatihan	1 Pkt	600.000	600.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			40.000.000
	00.00. 1 - Saprotan dan Insentif Kerja	20 Ha	2.000.000	40.000.000

NB: Perhitungan kegiatan Pengembangan Metode SRI dilakukan untuk setiap kelipatan 20 Ha

**e. Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian:
Rp. 10 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:**

1795.026	<i>Pra/Pasca Sertifikasi lahan Pertanian</i> Lokasi:	2 Pkt		20.000.000
1795.026.001	PRA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN Jumlah Komponen Utama			10.000.000 10.000.000
	011 Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Tanaman Pangan			10.000.000
	A) <i>Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			950.000
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 4 kali]	50 OH	5.000	250.000
	00.00. 2 - Konsumsi sosialisasi	60 OH	5.000	300.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	200.000	200.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			4.500.000
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			4.550.000
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	4 OP	350.000	1.400.000
1795.026.002	PASCA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN Jumlah Komponen Utama			10.000.000 10.000.000
	011 Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Tanaman Pangan			10.000.000
	A) <i>Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			1.650.000
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 1 kali]	10 OH	5.000	50.000
	00.00. 2 - Konsumsi evaluasi [60 org x 3 kali]	180 OH	5.000	900.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	500.000	500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			4.500.000
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			3.850.000
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	2 OP	350.000	700.000

**f. Sosialisasi 4 Peraturan Pemerintah:
52,45 jt/ Propinsi
Contoh Aplikasi di RKAKL:**

1795.994	LAYANAN PERKANTORAN		12 Bulan Layanan	52.450.000
	Lokasi:			
1795.994.002	SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1/2011, NOMOR 12/2012, NOMOR 25/2012 DAN NOMOR 30/2012			52.450.000
	Jumlah Komponen Utama			52.450.000
011	Sosialisasi PP Nomor 1/2011, Nomor 12/2012, Nomor 25/2012 dan Nomor 30/2012			52.450.000
	A) Sosialisasi PP di Provinsi			52.450.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1.500.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Penggandaan laporan sosialisasi Peraturan Pemerintah	20 Eks	25.000	500.000
	00.00. 2 - Fotocopy materi dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah	1 pkt	1.000.000	1.000.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>			1.950.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 > Honor panitia Sosialisasi Peraturan Pemerintah			1.950.000
	00.00. 2 - Honor Penanggung Jawab	1 OK	400.000	400.000
	00.00. 3 - Honor Ketua panitia	1 OK	350.000	350.000
	00.00. 4 - Honor Sekretaris	1 OK	300.000	300.000
	00.00. 5 - Honor Anggota	3 OK	300.000	900.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			8.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 > Honor Narasumber Sosialisasi Peraturan Pemerintah			8.000.000
	00.00. 2 - Honor Eselon I	2 OJ	1.300.000	2.600.000
	00.00. 3 - Honor Eselon II	2 OJ	900.000	1.800.000
	00.00. 4 - Honor Eselon III	4 OJ	900.000	3.600.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			11.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Konsumsi dalam rangka Sosialisasi Peraturan Pemerintah	100 OH	100.000	10.000.000
	00.00. 2 - Sewa ruang sidang	1 kali	1.000.000	1.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			30.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Bantuan transpor peserta rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah	100 OP	300.000	30.000.000

3. Pupuk dan Pestisida

a. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Propinsi: Besaran sesuai Alokasi Per Propinsi

Contoh Aplikasi di RKAKL:

3993.018	PENGUATAN KOMISI PENGAWAS PUPUK PESTISIDA (KP3) Lokasi:	1 Paket		800.000.000
3993.018.001	PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) Jumlah Komponen Utama			800.000.000
011	Penguatan Kelembagaan KP3 di Tingkat Propinsi Mendukung Tanaman Pangan			800.000.000
A)	Penguatan Kelembagaan KP3 di Tingkat Propinsi Mendukung Tanaman Pangan Padat			800.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			84.550.000
00.00.1	- Penjilidan dan Penggandaan Laporan	4 PKT	1.450.000	5.800.000
00.00.2	- Penggandaan Materi Dalam Rangka Rapat Koordinasi KP3	5 KALI	1.500.000	7.500.000
00.00.3	- Penggandaan Meteri dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	1 PKT	2.950.000	2.950.000
00.00.4	- Penggandaan Materi dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana di Bidang Pupuk dan Pestisida	1 PKT	4.000.000	4.000.000
00.00.5	- Penggandaan Materi dalam Rangka apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida (3 Angkatan)	3 PKT	2.000.000	6.000.000
00.00.6	- Perlengkapan Peserta Peningkatan Kinerja KP3	1 PKT	20.000.000	20.000.000
00.00.7	- Perlengkapan Peserta Apresiasi Petugas Pengawas Pukpes	3 PKT	7.500.000	22.500.000
00.00.8	- Perlengkapan Peserta Sosialisasi Tindak Pidana di Bidang Pupuk dan Pestisida	1 PKT	10.000.000	10.000.000
00.00.9	- Pembelian Sampel Pupuk	40 CTH	45.000	1.800.000
00.00.10	- Pembelian Sampel Pestisida	40 CTH	100.000	4.000.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			9.000.000
00.00.1	- Honor Panitia (3 Angkatan)	30 ORG	300.000	9.000.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			316.650.000
00.00.1	- Penyusunan Laporan	4 PKT	5.000.000	20.000.000
00.00.2	- Akomodasi dan Konsumsi dalam Rangka Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida (3 Angkatan)	1 PKT	75.000.000	75.000.000
00.00.3	- Pengiriman Sampel Pupuk dan Pestisida	1 PKT	1.650.000	1.650.000
00.00.4	- Konsumsi Rapat Koordinasi KP3	5 KALI	4.000.000	20.000.000
00.00.5	- Akomodasi dan Konsumsi Sosialisasi tindak Pidana di bidang Pupuk dan Pestisida	1 PKT	80.000.000	80.000.000
00.00.4	- Akomodasi dan Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Korwas Polda oleh PPNS	3 KALI	5.000.000	15.000.000
00.00.5	- Akomodasi dan Konsumsi dalam Rangka Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida (3 Angkatan)	3 PKT	35.000.000	105.000.000

522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.....)				77.100.000
00.00.1	- Honor Narasumber Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja	10	OJ	400.000	4.000.000
00.00.2	- Honor Narasumber Pusat dalam Rangka Peningkatan Kinerja KP3	2	OJ	850.000	1.700.000
00.00.3	- Honor Narasumber Pusat dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana di Bidang Pupuk dan Pestisida	12	OJ	850.000	10.200.000
00.00.4	- Honor Narasumber Pusat dalam Rangka Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida (3 Angkatan)	24	OJ	850.000	20.400.000
00.00.5	- Honor Narasumber Daerah dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana di Bidang Pupuk dan Pestisida	6	OJ	400.000	2.400.000
00.00.6	- Honor Narasumber Daerah dalam Rangka Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida (3 Angkatan)	96	OJ	400.000	38.400.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.....)				57.000.000
00.00.1	- Analisa Sampel Pupuk	40	CTH	450.000	18.000.000
00.00.2	- Analisa Sampel Pestisida	40	CTH	500.000	20.000.000
00.00.3	- Pengiriman Laporan	4	Pkt	500.000	2.000.000
00.00.4	- Biaya Diklat PPNS Kerjasama dengan Mabes Polri	1	ORG	17.000.000	17.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)				255.700.000
00.00.1	- Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	40	OP	800.000	32.000.000
00.00.2	- Pengawasan Pupuk Bersubsidi	40	OP	800.000	32.000.000
00.00.3	- Inventarisasi Pupuk dan Pestisida	29	OP	800.000	23.200.000
00.00.4	- Inventarisasi Kasus Tindak Pidana di Bidang Pupuk dan Pestisida	35	OP	800.000	28.000.000
00.00.5	- Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	2	OP	4.500.000	9.000.000
00.00.6	- Perjalanan Narasumber Pusat dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	2	OP	4.000.000	8.000.000
00.00.7	- Perjalanan Narasumber Pusat dalam Rangka Sosialisasi Tindak Pidana di Bidang Pupuk dan Pestisida	4	OP	4.000.000	16.000.000
00.00.8	- Perjalanan Petugas Pengambil Contoh (PPC)	2	OP	4.000.000	8.000.000
00.00.9	- Perjalanan Peserta Kab/ Kota dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3)	30	OP	800.000	24.000.000
00.00.10	- Perjalanan Peserta Kab/ Kota dalam Rangka Apresiasi Teknis Pengawas Pupuk dan Pestisida (3 Angkatan)	90	OP	400.000	36.000.000
00.00.11	- Perjalanan Narasumber Pusat dalam Rangka Apresiasi Teknis Pengawas Pupuk dan Pestisida (3 Angkatan)	4	OP	4.000.000	16.000.000
00.00.12	- Transport Peserta Rapat Koordinasi KP3	90	ORG	250.000	22.500.000
00.00.13	- Transport dalam Rangka Mengikuti Diklat PPNS dan Pestisida ke Pusat	2	OP	500.000	1.000.000

NB: Alokasi anggaran tiap Provinsi disesuaikan kebutuhan lokasi, sesuai hasil exercise per propinsi yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida

**b. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida (KP3) Tingkat Kab/Kota: 91,66 jt/ PKT
Contoh Aplikasi di RKAKL:**

3993.018	PENGUATAN KOMISI PENGAWAS PUPUK PESTISIDA (KP3) Lokasi:	1 Paket		91.660.000
3993.018.001	PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) Jumlah Komponen Utama			91.660.000
011	Penguatan Kelembagaan KP3 di Tingkat Kabupaten Mendukung Tanaman Pangan			91.660.000
A)	<i>Penguatan Kelembagaan KP3 Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.</i>			91.660.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			16.700.000
	00.00.1 - Penggandaan materi dalam rangka sinkronisasi pengawasan Pupuk dan Pestisida	1 PKT	1.500.000	1.500.000
	00.00.2 - Perlengkapan peserta Sinkronisasi Pengawasan	1 PKT	2.500.000	2.500.000
	00.00.3 - Perlengkapan peserta evaluasi KP3	1 PKT	2.500.000	2.500.000
	00.00.4 - Penggandaan materi dalam rangka evaluasi KP3	1 KALI	1.500.000	1.500.000
	00.00.5 - Penggandaan Materi dalam Rangka Rapat koordinasi KP3	4 KALI	1.500.000	6.000.000
	00.00.6 - Pembelian sampel pupuk	8 CTH	50.000	400.000
	00.00.7 - Pembelian sampel pestisida	8 CTH	100.000	800.000
	00.00.8 - Penjilidan dan Penggandaan Laporan	3 PKT	500.000	1.500.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			40.010.000
	00.00.1 - Pengiriman sampel pupuk dan pestisida	1 PKT	510.000	510.000
	00.00.2 - Akomodasi dan konsumsi rapat koordinasi KP3	4 KALI	3.000.000	12.000.000
	00.00.3 - Akomodasi dan konsumsi Sinkronisasi Pengawasan Pu	1 PKT	10.000.000	10.000.000
	00.00.4 - Akomodasi dan konsumsi rapat evaluasi KP3	1 KALI	10.000.000	10.000.000
	00.00.5 - Penyusunan laporan	3 PKT	2.500.000	7.500.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.....)			8.000.000
	00.00.1 - Honor narasumber daerah dalam rangka evaluasi KP3	10 OJ	400.000	4.000.000
	00.00.2 - Honor narasumber daerah dalam rangka sinkronisasi KP3	10 OJ	400.000	4.000.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.....)			7.750.000
	00.00.1 - Analisa sampel Pestisida	8 CTH	500.000	4.000.000
	00.00.2 - Pengiriman laporan	1 PKT	550.000	550.000
	00.00.3 - Analisa sampel pupuk	8 CTH	400.000	3.200.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			19.200.000
	00.00.1 - Inventarisasi pupuk dan pestisida	20 OP	300.000	6.000.000
	00.00.2 - Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida	44 OP	300.000	13.200.000

**c. Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Tingkat Propinsi: Besaran sesuai Alokasi Per
Propinsi**

Contoh Aplikasi di RKAKL:

3993.017	PENDAMPINGAN PENYALURAN PUPUK Lokasi:	1 Paket		1.633.190.000
3993.017.001	PERENCANAAN KEBUTUHAN PUPUK Jumlah Komponen Utama			1.633.190.000 1.633.190.000
	011 Identifikasi Kebutuhan Pupuk Mendukung Tanaman Pangan			130.390.000
	A) <i>Identifikasi Kebutuhan Pupuk Mendukung Tanaman Pangan Padi</i>			130.390.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			10.440.000
	00.00.1 - Penjilidan dan Penggandaan Laporan	1 PKT	750.000	750.000
	00.00.2 Rapat Koordinasi	3 KALI	3.230.000	9.690.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			6.750.000
	00.00.1 - Penyusunan Peraturan	1 PKT	2.250.000	2.250.000
	00.00.2 - Perencanaan Kebutuhan Pupuk	1 PKT	2.250.000	2.250.000
	00.00.3 - Penyusunan Laporan	1 PKT	2.250.000	2.250.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			113.200.000
	00.00.1 - Sosialisasi Pemupukan Berimbang	17 OP	800.000	13.600.000
	00.00.2 - Pembinaan dan Monitoring RDKK	30 OP	800.000	24.000.000
	00.00.3 - Pembinaan dan Monitoring Pemupukan Berimbang	17 OP	800.000	13.600.000
	00.00.4 - Pembinaan, Inventarisasi, dan Evaluasi Pengembangan Pupuk dan Pestisida	40 PKT	800.000	32.000.000
	00.00.4 - Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	6 OP	5.000.000	30.000.000
	012 Sosialisasi dan Pengawasan Pendampingan RDKK Mendukung Tanaman Pangan			1.502.800.000
	A) <i>Sosialisasi dan Pengawasan Pendampingan RDKK Mendukung Tanaman Pangan Padi</i>			1.502.800.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			234.000.000
	00.00.1 - ATK, Bahan/ Materi dan Perbanyakkan untuk Workshop Kec. (30 PKT x 26 KAB x 5 KEC)	3.900 PKT	50.000	195.000.000
	00.00.2 ATK, Bahan/ Materi dan Perbanyakkan untuk Workshop Kab. (30 PKT x 26 KAB)	780 PKT	50.000	39.000.000

521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			155.200.000
	(KPPN.....)			
00.00. 1	- Penyusunan Laporan Tingkat Kabupaten	26 PKT	250.000	6.500.000
00.00. 2	- Penyusunan Laporan Tingkat Provinsi	1 PKT	500.000	500.000
00.00. 3	- Workshop Penyusunan RDKK Kec. (30 ORG x 26 KAB x 5 KEC)	3.900 ORG	30.000	117.000.000
00.00. 4	- Workshop Penyusunan RDKK Kab. (30 ORG x 26 KAB)	780 ORG	40.000	31.200.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			101.400.000
	(KPPN.....)			
00.00. 1	- Honor Instruktur Kecamatan (6 OJ x 26 KAB x 5 KEC)	780 OJ	100.000	78.000.000
00.00. 2	- Honor Instruktur Kecamatan (6 OJ x 26 KAB)	156 OJ	150.000	23.400.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			1.012.200.000
	(KPPN.....)			
00.00. 1	- Perjalanan Penyuluh ke Kelompok Tani (2 KALI x 28540 GPKT)	57.080 KALI	15.000	856.200.000
00.00. 2	- Transport Peserta Kec. (30 ORG x 26 KAB x 5 KEC)	3.900 ORG	20.000	78.000.000
00.00. 3	- Transport Peserta Kec. (30 ORG x 26 KAB)	780 ORG	100.000	78.000.000

NB: Alokasi anggaran tiap Provinsi disesuaikan kebutuhan lokasi, sesuai hasil exercise per propinsi yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida

**d. Pendampingan Penyusunan RDKK Tingkat
Kab/Kota: Rp. 100 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:**

3993.017	PENDAMPINGAN PENYALURAN PUPUK Lokasi:	1 Paket		100.000.000
3993.017.001	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RDKK Jumlah Komponen Utama			100.000.000 100.000.000
011	Pendampingan Penyusunan RDKK Mendukung Tanaman Pangan			100.000.000
A)	<i>Pendampingan Penyusunan RDKK Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.</i>			100.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			8.000.000
	00.00. 1 - Penjilidan dan Penggandaan Laporan	4 PKT	500.000	2.000.000
	00.00. 2 Rapat Koordinasi	4 KALI	1.500.000	6.000.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			62.000.000
	00.00. 1 - Penyusunan Peraturan	2 PKT	2.000.000	4.000.000
	00.00. 2 - Perencanaan Kebutuhan Pupuk	1 PKT	2.000.000	2.000.000
	00.00. 3 - Penyusunan Laporan	1 PKT	2.000.000	2.000.000
	00.00. 3 - WorkshoPenyusunan RDKK di Kecamatan	15 PKT	3.600.000	54.000.000
524119	<u>Belanja Perialanan Lainnya</u> (KPPN.....)			30.000.000
	00.00. 1 - Pembinaan dan Monitoring RDKK	16 OP	500.000	8.000.000
	00.00. 2 - Pembinaan dan Monitoring Pemupukan Berimbang	16 OP	500.000	8.000.000
	00.00. 3 - Pembinaan, Inventarisasi, dan Evaluasi Pengembangan Pupuk	16 OP	500.000	8.000.000
	00.00. 4 - Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	4 OP	1.500.000	6.000.000

4. Pembiayaan

a. Pengembangan Asuransi Pertanian (Provinsi):

Rp. 100 jt/Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

3994.016	FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN Lokasi:	1 Paket		100.000.000
3994.016.001	PENGEMBANGAN ASURANSI PERTANIAN Jumlah Komponen Utama			100.000.000 100.000.000
011	Pengembangan Asuransi Pertanian Mendukung Tanaman Pangan			100.000.000
A)	<i>Pengembangan Asuransi Pertanian Mendukung Tanaman Pangan Padi</i>			100.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			5.500.000
	00.00.1 - ATK	1 TAHUN	2.500.000	2.500.000
	00.00.2 - Koordinasi dengan Instansi terkait	1 THN	3.000.000	3.000.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			7.200.000
	00.00.1 - Honor Tim Asuransi Pertanian	24 OB	300.000	7.200.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			7.500.000
	00.00.1 - Koordinasi	1 TAHUN	7.500.000	7.500.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			22.200.000
	00.00.1 - Koordinasi dengan instansi terkait	22 OH	300.000	6.600.000
	00.00.2 - Pengumpulan data dan Informasi	40 OH	300.000	12.000.000
	00.00.3 - Monev	12 OH	300.000	3.600.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			57.600.000
	00.00.1 - Insentif Premi Asuransi	400 HA	144.000	57.600.000

b. Operasional Puap (Provinsi): Rp. 50 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:

3994.017	OPERASIONAL PUAP Lokasi:	1 PAKET		50.000.000
3994.017.001	OPERASIONAL PUAP DI PROPINSI Mendukung TANAMAN PANGAN Jumlah Komponen Utama			50.000.000
011	Operasional PUAP di Propinsi Mendukung Tanaman Pangan Padi			50.000.000
A)	<i>Operasional PUAP di Propinsi Mendukung Tanaman Pangan Padi</i>			50.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			16.400.000
	00.00. 1 - Pertemuan Rapat Dalam Rangka Monev	1 TAHUN	13.000.000	13.000.000
	00.00. 2 - ATK dan Bahan Komputer	1 TAHUN	3.400.000	3.400.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			14.400.000
	00.00. 1 - Honor Tim Pembina PUAP	48 OB	300.000	14.400.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			19.200.000
	00.00. 1 - Perjalanan Menghadiri Pertemuan PUAP Pusat	2 OP	6.000.000	12.000.000
	00.00. 2 - Perjalanan ke Kabupaten/Kota	24 OH	300.000	7.200.000

c. Operasional Pembiayaan/PUAP Kab/Kota:
Rp. 25 jt/ Pkt
 Contoh Aplikasi di RKAKL:

3994.017	OPERASIONAL PUAP Lokasi:	1 PAKET		25.000.000
3994.017.002	OPERASIONAL PEMBIAYAAN/PUAP KAB/KOTA MENDUKUNG TANAMAN PANGAN Jumlah Komponen Utama			25.000.000 25.000.000
	011 Operasional Pembiayaan/ Puap Kab/ Kota Mendukung Tanaman Pangan Padi			25.000.000
	A) <i>Operasional Pembiayaan/ Puap Kab/ Kota Mendukung Tanaman Pangan Padi di Kab.....</i>			25.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			9.000.000
	00.00. 1 - ATK dan Bahan Komputer	1 TAHUN	1.500.000	1.500.000
	00.00. 2 - Pertemuan Rapat/ Koordinasi	1 TAHUN	7.500.000	7.500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			6.000.000
	00.00. 1 - Honor Tim Teknis	30 OB	200.000	6.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			10.000.000
	00.00. 1 - Konsultasi ke Propinsi	4 OH	400.000	1.600.000
	00.00. 2 - Perjalanan Pembinaan/ Verifikasi ke Gapoktan	56 OH	150.000	8.400.000

5. Alat dan Mesin Pertanian

a. Operasional Pengembangan, Pengawasan, dan Kelembagaan Alsintan Tingkat Propinsi:

Rp. 100 jt/ Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1796.021	OPERASIONAL PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN KELEMBAGAAN ALSINTAN Lokasi:	1 PKT		100.000.000
1796.021.001	FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN Mendukung TANAMAN PANGAN Jumlah Komponen Utama			100.000.000 100.000.000
011	Penyusunan Kebutuhan Alsintan Mendukung Tanaman Pangan Padi			10.000.000
A)	Penyusunan Kebutuhan Alsintan Mendukung Tanaman Pangan Padi			10.000.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.....)			3.000.000
00.00.1	- Penyusunan Database Alsintan dan Inventarisasi UPJA	1 Pkt	3.000.000	3.000.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya			7.000.000
00.00.1	- Pengumpulan Data dan Informasi	20 OH	350.000	7.000.000
012	Pendampingan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Kelembagaan Alsintan Mendukung Tanaman Pangan Padi			90.000.000
A)	Pendampingan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Kelembagaan Alsintan Mendukung Tanaman Pangan Padi			90.000.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.....)			55.700.000
00.00.1	- Penyusunan Petunjuk Teknis	1 Paket	3.000.000	3.000.000
00.00.2	- Lomba UPJA Prestasi	1 Paket	3.000.000	3.000.000
00.00.3	- Peningkatan Pengelolaan, Pengawasan, dan Kelembagaan Alsintan/ UPJA Melalui Pelatihan, TOT, Apresiasi Petugas Pengawas	3 Paket	3.000.000	9.000.000
00.00.4	- Demo Teknologi dan Sekolah Lapang	2 Paket	3.500.000	7.000.000
00.00.5	- Koordinasi Mobilisasi Alsintan guna Percepatan Olah Tanah dan Tanam Serempak, Brigade Tanam	1 Tahun	3.000.000	3.000.000
00.00.6	- Operasional Pelaksanaan Percepatan olah tanah dan tanam serempak/ brigade tanam	1 Tahun	30.000.000	30.000.000
00.00.7	- ATK dan Bahan Komputer	1 Paket	700.000	700.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya			34.300.000
00.00.1	- CPCL, Bimbingan, Pembinaan, dan Pendampingan Pengembangan, KelembagaanAlsintan/ UPJA, dan Pemantauan Peredaran Alsintan	44 OH	350.000	15.400.000
00.00.2	- Penilaian Lomba UPJA Prestasi	24 OH	350.000	8.400.000
00.00.3	- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pusat	3 OP	3.500.000	10.500.000

B. Mendukung Hortikultura

1. Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan Sumber Air: Rp. 60 jt/ Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.001	PENGEMBANGAN SUMBER AIR Lokasi:	1 Pkt		60.000.000
1794.001.001	PENGEMBANGAN SUMBER AIR Mendukung HORTIKULTURA Jumlah Komponen Utama			60.000.000
011	Pengembangan Sumber Air Mendukung Hortikultura Mangga			60.000.000
A)	<i>Pengembangan Sumber Air Mendukung Hortikultura Mangga di Kab.</i>			60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			60.000.000
00.00.1	- Pembangunan Konstruksi Pengembangan Sumber Air dan Konstruksi Kerja	1 Pkt	60.000.000	60.000.000

b. Pengembangan Embung: Rp. 60 jt/ Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.022	KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM Lokasi:	1 Pkt		60.000.000
1794.022.001	KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM MENDUKUNG HORTIKULTURA Jumlah Komponen Utama			60.000.000
011	Pengembangan Embung Mendukung Hortikultura Jeruk			60.000.000
A)	<i>Pengembangan Embung Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab.</i>			60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			60.000.000
00.00.1	- Bahan Material dan Insentif Kerja Pengembangan Embung	1 Pkt	60.000.000	60.000.000

c. Pemberdayaan Kelembagaan: Rp. 80 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.024	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN Lokasi:	1 Pkt		80.000.000
1794.024.002	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN P3A Mendukung HORTIKULTURA Jumlah Komponen Utama			80.000.000
	011 Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Hortikultura Jeruk			1.600.000
	A) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab.			1.600.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			1.600.000
	00.00. 1 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka PSETK/ Penelusuran Jaringan (1 hari x 30 org)	30 OH	25.000	750.000
	00.00. 2 - Peralatan Pelaksanaan PSETK	1 PKT	350.000	350.000
	00.00. 3 - Penggantian dan Penyusunan Laporan PSETK	1 PKT	500.000	500.000
	012 Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Hortikultura Jeruk			17.400.000
	A) Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab.			17.400.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			5.600.000
	00.00. 1 - ATK dan Bahan Komputer	1 PKT	750.000	750.000
	00.00. 2 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka pelatihan penguatan kelembagaan (2 hari x 35 Org)	70 PKT	25.000	1.750.000
	00.00. 3 - Fotocopy, dokumentasi dan lain - lain (20 lbr x 25 Org x 2 hari)	1.000 LBR	200	200.000
	00.00. 4 - Display/Alat Peraga/Modul/dll	1 PKT	900.000	900.000
	00.00. 5 - Perlengkapan Peserta	25 ORG	60.000	1.500.000
	00.00. 6 - Penggantian dan Penyusunan Laporan	1 PKT	500.000	500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			3.700.000
	00.00. 1 - Honor Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	250.000	2.500.000
	00.00. 2 - Honor Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	200.000	1.200.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.....)			4.800.000
	00.00. 1 - Honor Narasumber/Instruktur	16 OJ	300.000	4.800.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			3.300.000
	00.00. 1 - Penggantian Transport Narasumber/Instruktur (2 org x 2 hari)	4 OH	150.000	600.000
	00.00. 2 - Penggantian Transport Petugas/Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	100.000	1.000.000
	00.00. 3 - Penggantian Transport Peserta (25 org x 2 hari)	50 OH	25.000	1.250.000
	00.00. 4 - Penggantian Transport Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	75.000	450.000
	013 Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Hortikultura Jeruk			1.000.000
	A) Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab.			1.000.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.....)			1.000.000
	00.00. 1 - Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A	1 PKT	1.000.000	1.000.000
	014 Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Hortikultura Jeruk			60.000.000
	A) Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab.			60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			60.000.000
	00.00. 1 - Bahan Material Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)	1 Unit	60.000.000	60.000.000

2. Perluasan dan Pengelolaan Lahan

a. Pengembangan Jalan Pertanian: Rp. 100 jt/ Km

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.006	PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN	1 Km		100.000.000
	Lokasi: Kab.			
1795.006.001	PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN Mendukung HORTIKULTURA			100.000.000
	Jumlah Komponen Utama			100.000.000
	011 Pengembangan Jalan Pertanian Mendukung Hortikultura Jeruk			100.000.000
	A) Pengembangan Jalan Pertanian Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab.			100.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>			100.000.000
	(KPPN.....)			100.000.000
	00.00.1 - Insentif Kerja, Konstruksi, dan Sewa Alat	1 Km	100.000.000	100.000.000

b. Pengembangan Optimasi Lahan: Rp. 2,1 jt/ Ha

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.002	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN	20 Ha		42.000.000
	Lokasi:			
1795.002.002	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN Mendukung HORTIKULTURA			42.000.000
	Jumlah Komponen Utama			42.000.000
	011 Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Hortikultura Jeruk			42.000.000
	A) Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab.			42.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			300.000
	(KPPN.....)			
	00.00.1 - Bantuan Transport Tim Teknis	3 OH	100.000	300.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			200.000
	(KPPN.....)			
	00.00.1 - Pengawalan / Sosialisasi	1 Pkt	200.000	200.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>			41.500.000
	(KPPN.....)			
	00.00.1 - Saprotan dan Insentif Kerja	20 Ha	2.075.000	41.500.000

NB:1. Perhitungan kegiatan optimasi lahan dilakukan untuk setiap kelipatan 20 Ha

c. Perluasan Areal Hortikultura: Rp. 7 jt/ Ha
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.028	PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN Lokasi: Kab.	1 Ha		7.000.000
1795.028.001	PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA Jumlah Komponen Utama			7.000.000
	011 Perluasan Areal Hortikultura Mangga			7.000.000
	A) <i>Perluasan Areal Hortikultura Mangga di Kab.</i>			7.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			7.000.000
	00.00.1 - Konstruksi, Bibit, dan Saprotan Perluasan Areal Hortikultura	1 Ha	7.000.000	7.000.000

**d. Pra/ Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian:
Rp. 10 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:**

1795.026	<i>Pra/Pasca Sertifikasi lahan Pertanian</i>	2 Pkt		20.000.000
	Lokasi:			
1795.026.001	PRA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN			10.000.000
	Jumlah Komponen Utama			10.000.000
	012 Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Hortikultura			10.000.000
	A) <i>Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			950.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 4 kali]	50 OH	5.000	250.000
	00.00. 2 - Konsumsi sosialisasi	60 OH	5.000	300.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	200.000	200.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>			4.500.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			4.550.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	4 OP	350.000	1.400.000
1795.026.002	PASCA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN			10.000.000
	Jumlah Komponen Utama			10.000.000
	012 Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Hortikultura			10.000.000
	A) <i>Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Hortikultura Jeruk di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1.650.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 1 kali]	10 OH	5.000	50.000
	00.00. 2 - Konsumsi evaluasi [60 org x 3 kali]	180 OH	5.000	900.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	500.000	500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>			4.500.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			3.850.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	2 OP	350.000	700.000

1 PAKET = 50 PERSIL

C. Mendukung Perkebunan

1. Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan Sumber Air: Rp. 60 jt/ Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.001	PENGEMBANGAN SUMBER AIR Lokasi:	1 Pkt		60.000.000
1794.001.002	PENGEMBANGAN SUMBER AIR Mendukung Perkebunan Jumlah Komponen Utama			60.000.000
011	Pengembangan Sumber Air Mendukung Perkebunan Tebu			60.000.000
A)	<i>Pengembangan Sumber Air Mendukung Perkebunan Tebu di Kab.</i>			60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			60.000.000
00.00.1	- Pembangunan Konstruksi Pengembangan Sumber Air dan Konstruksi Kerja	1 Pkt	60.000.000	60.000.000

b. Pengembangan Embung: Rp. 60 jt/ Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.022	KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM Lokasi:	1 Pkt		60.000.000
1794.022.002	KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM Mendukung Perkebunan Jumlah Komponen Utama			60.000.000
011	Pengembangan Embung Mendukung Perkebunan Kakao			60.000.000
A)	<i>Pengembangan Embung Mendukung Perkebunan Kakao di Kab.</i>			60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			60.000.000
00.00.1	- Bahan Material dan Insentif Kerja Pengembangan Embung	1 Pkt	60.000.000	60.000.000

c. Pemberdayaan Kelembagaan: Rp. 80 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.024	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN	1 Pkt		80.000.000
	Lokasi:			
1794.024.003	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN P3A Mendukung PERKEBUNAN			80.000.000
	Jumlah Komponen Utama			80.000.000
	011 Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Perkebunan Tebu			1.600.000
	A) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Perkebunan Tebu di Kab.			1.600.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1.600.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka PSETK/ Penelusuran Jaringan (1 hari x 30 org)	30 OH	25.000	750.000
	00.00. 2 - Peralatan Pelaksanaan PSETK	1 PKT	350.000	350.000
	00.00. 3 - Penggantian dan Penyusunan Laporan PSETK	1 PKT	500.000	500.000
	012 Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Perkebunan Tebu			17.400.000
	A) Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Perkebunan Tebu di Kab.			17.400.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			5.600.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - ATK dan Bahan Komputer	1 PKT	750.000	750.000
	00.00. 2 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka pelatihan penguatan kelembagaan (2 hari x 35 Org)	70 PKT	25.000	1.750.000
	00.00. 3 - Fotocopy, dokumentasi dan lain - lain (20 lbr x 25 Org x 2 hari)	1.000 LBR	200	200.000
	00.00. 4 - Display/Alat Peraga/Modul/dll	1 PKT	900.000	900.000
	00.00. 5 - Perlengkapan Peserta	25 ORG	60.000	1.500.000
	00.00. 6 - Penggantian dan Penyusunan Laporan	1 PKT	500.000	500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>			3.700.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Honor Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	250.000	2.500.000
	00.00. 2 - Honor Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	200.000	1.200.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			4.800.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Honor Narasumber/Instruktur	16 OJ	300.000	4.800.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			3.300.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Penggantian Transport Narasumber/Instruktur (2 org x 2 hari)	4 OH	150.000	600.000
	00.00. 2 - Penggantian Transport Petugas/Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	100.000	1.000.000
	00.00. 3 - Penggantian Transport Peserta (25 org x 2 hari)	50 OH	25.000	1.250.000
	00.00. 4 - Penggantian Transport Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	75.000	450.000
	013 Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Perkebunan Tebu			1.000.000
	A) Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Perkebunan Tebu di Kab.			1.000.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			1.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A	1 PKT	1.000.000	1.000.000
	014 Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Perkebunan Tebu			60.000.000
	A) Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Perkebunan Tebu di Kab.			60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>			60.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Bahan Material Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)	1 Unit	60.000.000	60.000.000

2. Perluasan dan Pengelolaan Lahan

a. Pengembangan Jalan Pertanian: Rp. 100 jt/ Km

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.006	PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN	1 Km		100.000.000
	Lokasi: Kab.			
1795.006.002	PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN Mendukung PERKEBUNAN			100.000.000
	Jumlah Komponen Utama			100.000.000
	011 Pengembangan Jalan Pertanian Mendukung Perkebunan Tebu			100.000.000
	A) Pengembangan Jalan Pertanian Mendukung Perkebunan Tebu di Kab.			100.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>			100.000.000
	(KPPN.....)			100.000.000
	00.00.1 - Insentif Kerja, Konstruksi, dan Sewa Alat	1 Km	100.000.000	100.000.000

b. Pengembangan Optimasi Lahan: Rp. 2,1 jt/ Ha

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.002	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN	20 Ha		42.000.000
	Lokasi:			
1795.002.003	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN Mendukung PERKEBUNAN			42.000.000
	Jumlah Komponen Utama			42.000.000
	011 Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Perkebunan Tebu			42.000.000
	A) Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Perkebunan Tebu di Kab.			42.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			300.000
	(KPPN.....)			
	00.00.1 - Bantuan Transport Tim Teknis	3 OH	100.000	300.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			200.000
	(KPPN.....)			
	00.00.1 - Pengawasan / Sosialisasi	1 Pkt	200.000	200.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>			41.500.000
	(KPPN.....)			
	00.00.1 - Saprotan dan Insentif Kerja	20 Ha	2.075.000	41.500.000

NB:1. Perhitungan kegiatan optimasi lahan dilakukan untuk setiap kelipatan 20 Ha

c. Perluasan Areal Perkebunan: Rp. 7 jt/ Ha

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.028	PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN Lokasi: Kab.	1 Ha		7.000.000
1795.028.002	PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN Jumlah Komponen Utama			7.000.000 7.000.000
011	Perluasan Areal Perkebunan Karet			7.000.000
A)	Perluasan Areal Perkebunan Karet di Kab.			7.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			7.000.000
00.00.1	- Konstruksi, Bibit, dan Saprotan Perluasan Areal Perkebunan	1 Ha	7.000.000	7.000.000

d. Perluasan Areal Tebu: Rp. 10 jt/ Ha

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.028	PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN Lokasi: Kab.	1 Ha		10.000.000
1795.028.004	PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN TEBU Jumlah Komponen Utama			10.000.000 10.000.000
011	Perluasan Areal Perkebunan Tebu			10.000.000
A)	Perluasan Areal Perkebunan Tebu di Kab.			10.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			10.000.000
00.00.1	- Konstruksi, Bibit, dan Saprotan Perluasan Areal Tebu	1 Ha	10.000.000	10.000.000

**e. Pra/ Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian:
Rp. 10 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:**

1795.026	Pra/Pasca Sertifikasi lahan Pertanian Lokasi:	2 Pkt		20.000.000
1795.026.001	PRA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN Jumlah Komponen Utama			10.000.000 10.000.000
	013 Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Perkebunan			10.000.000
	A) <i>Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Perkebunan Karet di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			950.000
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 4 kali]	50 OH	5.000	250.000
	00.00. 2 - Konsumsi sosialisasi	60 OH	5.000	300.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	200.000	200.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			4.500.000
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			4.550.000
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	4 OP	350.000	1.400.000
1795.026.002	PASCA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN Jumlah Komponen Utama			10.000.000 10.000.000
	013 Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Perkebunan			10.000.000
	A) <i>Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Perkebunan Karet di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.....)			1.650.000
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 1 kali]	10 OH	5.000	50.000
	00.00. 2 - Konsumsi evaluasi [60 org x 3 kali]	180 OH	5.000	900.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	500.000	500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.....)			4.500.000
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			3.850.000
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	2 OP	350.000	700.000

1 PAKET = 50 PERSIL

D. Mendukung Peternakan

1. Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan Sumber Air: Rp. 60 jt/ Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.001	PENGEMBANGAN SUMBER AIR Lokasi:	1 Pkt		60.000.000
1794.001.003	PENGEMBANGAN SUMBER AIR Mendukung Peternakan Jumlah Komponen Utama			60.000.000
	011 Pengembangan Sumber Air Mendukung Peternakan Sapi			60.000.000
	A) Pengembangan Sumber Air Mendukung Peternakan Sapi di Kab.			60.000.000
573111	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang (KPPN.....)			60.000.000
	00.00.1 - Pembangunan Konstruksi Pengembangan Sumber Air dan Konstruksi Kerja	1 Pkt	60.000.000	60.000.000

b. Pengembangan Embung: Rp. 60 jt/ Pkt

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.022	KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM Lokasi:	1 Pkt		60.000.000
1794.022.003	KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM Mendukung Peternakan Jumlah Komponen Utama			60.000.000
	011 Pengembangan Embung Mendukung Peternakan Kerbau			60.000.000
	A) Pengembangan Embung Mendukung Peternakan Kerbau di Kab.			60.000.000
573111	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang (KPPN.....)			60.000.000
	00.00.1 - Bahan Material dan Insentif Kerja Pengembangan Embung	1 Pkt	60.000.000	60.000.000

c. Pemberdayaan Kelembagaan: Rp. 80 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1794.024	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN		1 Pkt		80.000.000
	Lokasi:				
1794.024.004	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN P3A Mendukung PETERNAKAN				80.000.000
	Jumlah Komponen Utama				80.000.000
	011 Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Peternakan Sapi				1.600.000
	A) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Mendukung Peternakan Sapi di Kab.				1.600.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				1.600.000
	(KPPN.....)				
	00.00. 1 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka PSETK/ Penelusuran Jaringan (1 hari x 30 org)	30 OH	25.000		750.000
	00.00. 2 - Peralatan Pelaksanaan PSETK	1 PKT	350.000		350.000
	00.00. 3 - Penggantian dan Penyusunan Laporan PSETK	1 PKT	500.000		500.000
	012 Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Peternakan Sapi				17.400.000
	A) Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A Mendukung Peternakan Sapi di Kab.				17.400.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				5.600.000
	(KPPN.....)				
	00.00. 1 - ATK dan Bahan Komputer	1 PKT	750.000		750.000
	00.00. 2 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka pelatihan penguatan kelembagaan (2 hari x 35 Org)	70 PKT	25.000		1.750.000
	00.00. 3 - Fotocopy, dokumentasi dan lain - lain (20 lbr x 25 Org x 2 hari)	1.000 LBR	200		200.000
	00.00. 4 - Display/Alat Peraga/Modul/dll	1 PKT	900.000		900.000
	00.00. 5 - Perlengkapan Peserta	25 ORG	60.000		1.500.000
	00.00. 6 - Penggantian dan Penyusunan Laporan	1 PKT	500.000		500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>				3.700.000
	(KPPN.....)				
	00.00. 1 - Honor Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	250.000		2.500.000
	00.00. 2 - Honor Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	200.000		1.200.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				4.800.000
	(KPPN.....)				
	00.00. 1 - Honor Narasumber/Instruktur	16 OJ	300.000		4.800.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>				3.300.000
	(KPPN.....)				
	00.00. 1 - Penggantian Transport Narasumber/Instruktur (2 org x 2 hari)	4 OH	150.000		600.000
	00.00. 2 - Penggantian Transport Petugas/Panitia (5 org x 2 hari)	10 OH	100.000		1.000.000
	00.00. 3 - Penggantian Transport Peserta (25 org x 2 hari)	50 OH	25.000		1.250.000
	00.00. 4 - Penggantian Transport Pendamping (3 org x 2 hari)	6 OH	75.000		450.000
	013 Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Peternakan Sapi				1.000.000
	A) Legalisasi Kelembagaan P3A Mendukung Peternakan Sapi di Kab.				1.000.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				1.000.000
	(KPPN.....)				
	00.00. 1 - Fasilitasi Legalisasi Kelembagaan P3A	1 PKT	1.000.000		1.000.000
	014 Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Peternakan Sapi				60.000.000
	A) Pengelolaan Irigasi Partisipatif Mendukung Peternakan Sapi di Kab.				60.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>				60.000.000
	(KPPN.....)				
	00.00. 1 - Bahan Material Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)	1 Unit	60.000.000		60.000.000

2. Perluasan dan Pengelolaan Lahan

a. Pengembangan Jalan Pertanian: Rp. 100 jt/ Km

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.006	PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN Lokasi: Kab.	1 Km		100.000.000
1795.006.003	PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN Mendukung PETERNAKAN Jumlah Komponen Utama			100.000.000
	011 Pengembangan Jalan Pertanian Mendukung Peternakan Sapi			100.000.000
	A) Pengembangan Jalan Pertanian Mendukung Peternakan Sapi di Kab.			100.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			100.000.000
	00.00.1 - Insentif Kerja, Konstruksi, dan Sewa Alat	1 Km	100.000.000	100.000.000

b. Pengembangan Optimasi Lahan: Rp. 2,1 jt/ Ha

Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.002	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN Lokasi:	20 Ha		42.000.000
1795.002.004	PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN Mendukung PETERNAKAN Jumlah Komponen Utama			42.000.000
	011 Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Peternakan Sapi			42.000.000
	A) Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Peternakan Sapi di Kab.			42.000.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u> (KPPN.....)			300.000
	00.00.1 - Bantuan Transport Tim Teknis	3 OH	100.000	300.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.....)			200.000
	00.00.1 - Pengawasan / Sosialisasi	1 Pkt	200.000	200.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u> (KPPN.....)			41.500.000
	00.00.1 - Saprotan dan Insentif Kerja	20 Ha	2.075.000	41.500.000

NB:1. Perhitungan kegiatan optimasi lahan dilakukan untuk setiap kelipatan 20 Ha

c. Perluasan Areal Peternakan: Rp. 7 jt/ Ha
Contoh Aplikasi di RKAKL:

1795.028	PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN	1 Ha		7.000.000
	Lokasi: Kab.			
1795.028.003	PERLUASAN AREAL PETERNAKAN			7.000.000
	Jumlah Komponen Utama			7.000.000
011	Perluasan Areal Peternakan Sapi			7.000.000
	A) <i>Perluasan Areal Peternakan Sapi di Kab.</i>			7.000.000
573111	<u>Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang</u>			7.000.000
	(KPPN.....)			
	00.00.1 - Konstruksi, Bibit, dan Saprotan Perluasan Areal Peternakan	1 Ha	7.000.000	7.000.000

**d. Pra/ Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian:
Rp. 10 jt/ Pkt
Contoh Aplikasi di RKAKL:**

1795.026	<i>Pra/Pasca Sertifikasi lahan Pertanian</i>	2 Pkt		20.000.000
	Lokasi:			
1795.026.001	PRA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN			10.000.000
	Jumlah Komponen Utama			10.000.000
	014 Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Peternakan			10.000.000
	A) <i>Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Peternakan Sapi di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			950.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 4 kali]	50 OH	5.000	250.000
	00.00. 2 - Konsumsi sosialisasi	60 OH	5.000	300.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	200.000	200.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>			4.500.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			4.550.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	4 OP	350.000	1.400.000
1795.026.002	PASCA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN			10.000.000
	Jumlah Komponen Utama			10.000.000
	014 Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Peternakan			10.000.000
	A) <i>Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Peternakan Sapi di Kab. (50 Persil)</i>			10.000.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1.650.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Konsumsi rapat [10 org x 1 kali]	10 OH	5.000	50.000
	00.00. 2 - Konsumsi evaluasi [60 org x 3 kali]	180 OH	5.000	900.000
	00.00. 3 - Konsumsi dalam Penyusunan Laporan [5 org x 1 hari]	5 OH	40.000	200.000
	00.00. 4 - ATK dan Penggandaan Laporan	1 pkt	500.000	500.000
521213	<u>Honor Output Kegiatan</u>			4.500.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Staf Administrasi [9 bulan x 1 org]	9 OB	100.000	900.000
	00.00. 2 - Honor Kelompok Kerja [9 org x 4 kali]	36 org	100.000	3.600.000
524119	<u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>			3.850.000
	(KPPN.....)			
	00.00. 1 - Perjalanan Pokja Kabupaten ke Lokasi	9 OP	350.000	3.150.000
	00.00. 2 - Perjalanan Petugas Kantah ke lokasi	2 OP	350.000	700.000

1 PAKET = 50 PERSIL

Harga Satuan Pokok Kegiatan Prasarana dan Sarana pertanian tersebut hanya mencakup kegiatan pokok lingkup Ditjen. PSP. Apabila ada kegiatan lain yang masih dapat dikategorikan kedalam tupoksi Ditjen. PSP namun belum tercantum harga standartnya, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan unit cost setempat dengan dilengkapi data dukung (HSPK di SK Bupati, price list, dll) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)-nya.

VII. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI LINGKUP DITJEN. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

7.1. Kegiatan Kerjasama Luar Negeri

Pada TA. 2013 ada beberapa kegiatan kerjasama luar negeri (Pinjaman-Hibah Luar Negeri/ PHLN) di lingkup Ditjen. PSP, yaitu:

a. Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) Loan World Bank (IBRD)

Program Water Resources and Irrigation Sector Mangement Program (WISMP) merupakan program bantuan pinjaman dari Bank Dunia melalui Indonesai Water Resources and Irrigation Reform Implementation Program (IWIRIP). Program dilaksanakan melalui perangkat pinjaman adjustable program Loan (APL), untuk APL-II akan dimulai tahun 2013. APL merupakan program jangka panjang yang telah disepakati dan dilaksanakan melalui tahapan proyek, dan masing-masing dinilai secara terpisah. Progress tahapan berikutnya tergantung dari diselesaikannya patokan institusi dan kebijakan yang sudah disetujui untuk setiap tahapan sebelumnya.

Tujuan dilaksanakannya program WISM adalah untuk mengkonsolidasikan institusi pengelola sector sumberdaya

air dan irigasi masyarakat yang telah didesentralisasikan menggunakan Reformasi WATSAL. Kebijakan tersebut dengan memberikan peran yang lebih besar kepada P3A/GP3A dengan prinsip satu system satu pengelolaan dan lebih spesifik pada peran partisipasi P3A dalam pengelolaan irigasi. Program WISMP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerinta pusat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melalui : 1) Peningkatan governance, pengelolaan lembaga, keberlanjutan fiscal, perencanaan dan kinerja sumber daya air dan irigasi; 2) Meningkatkan penyatuan system kelembagaan, pembiayaan, kegiatan perencanaan dan kinerja pengelolaan sungai dan irigasi; 3) Melaksanakan instrument penunjang sector pertanian untuk meningkatkan produktifitas partanian beririgasi dan 4) Intervensi ekonomi dan fisik untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian beririgasi. Komponen kegiatan WISMP pertanian adalah : Komponen B4 (program pertanian pada lahan beririgasi) dan sedikit kewenangan di B1 (Peningkatan kemampuan pemerintahan dan P3A) dan B2 (Peningkatan kemampuan kapasitas dinas). Sebagai institusi pelaksana adalah Ditjen SDA Kementerian PU, Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Propinsi

pelaksana proyek adalah NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Sulteng, Sulbar dan NTT.

Pedoman untuk kegiatan ini secara detail akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.

b. Second Kennedy Round

Kegiatan ini dibiayai dengan pinjaman dari CF SKR Jepang untuk mendukung rehabilitasi jaringan irigasi pasca bencana Merapi. Lokasi direncanakan di sekitar Gunung Merapi , yaitu Sleman, Boyolali dan Klaten.

Pedoman untuk kegiatan ini secara lebih detail akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.

7.2. Koridor Penyusunan RKAKL Kegiatan Kerjasama Luar Negeri

Dalam menyusun RKAKL kegiatan kerjasama luar negeri lingkup Ditjen. PSP agar mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mengikuti Annual Work Plan (AWP), didalam merencanakan kegiatan proyek harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan keseluruhan dan pagu anggaran per kategori kegiatan (untuk menghindari "over drawn").

2. Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan kategori kegiatan yang tercantum dalam *Loan Agreement*. Kategori kegiatan dan *Loan Agreement* merupakan payung seluruh kegiatan yang ada di RKAKL. Kegiatan yang tidak relevan/ tidak sesuai dengan kategori yang ada agar tidak dimasukkan ke usulan RKAKL.
3. Penyusunan RKAKL harus menggunakan kodefikasi PHLN sesuai ketentuan dalam Loan Agreement (LA) dan Petunjuk Teknis Penyusunan DIPA antara lain:
 - a. Kode Biaya

Pada kode anggaran, contoh: B23 berupa **kode huruf** terletak pada digit ke 1 (satu).

Kode A artinya RM (Rupiah Murni)

Kode B artinya PHLN

Kode C artinya Local Cost

Kode D artinya PNBP

Kode H artinya Hibah DN

Kode I artinya Hibah LN

Pada kegiatan PHLN lingkup Ditjen PSP, kode yang digunakan yaitu: A (RM), B (PHLN) dan C (Local Cost) sesuai kategori di LA-nya.
 - b. Kode Jenis Pinjaman

Pada kode anggaran PHLN, contoh: B23 berupa **kode angka** terletak pada digit ke 2 (dua).

Kode 1 artinya Pinjaman Valas

Kode 2 artinya Pinjaman RPLN (Rupiah Pinjaman
Luar Negeri)

Kode 3 artinya Hibah Valas

Kode 4 artinya Hibah RPLN

Jika Pinjaman atau Hibah pada Loan Agreement
berupa uang rupiah maka pinjaman tersebut masuk
kategori Pinjaman RPLN.

c. Kode Cara Bayar

Pada kode anggaran PHLN, contoh: B23 berupa **kode angka** terletak pada digit ke 3 (tiga).

Kode 1 artinya PP (Pembiayaan Pendahuluan)

Kode 2 artinya PL (Pembiayaan Langsung)

Kode 3 artinya RK (Rekening Khusus)

Kode 4 artinya LC (Letter of Credit)

Secara umum Loan dan Grant lingkup Ditjen PSP
menggunakan cara bayar RK.

Jenis Kode Cara Bayar dipakai agar dikonfirmasi
kepada Bagian Perencanaan Setditjen. PSP.

d. Kode Cara Hitung

Pada anggaran PHLN ada 4 (empat) jenis cara hitung,
yaitu:

1. Non PPN
2. Netto

3. Bruto

4. Non Sharing

Cara hitung kegiatan PHLN di lingkup Ditjen. PSP adalah menggunakan Non PPN pada Akun Belanja Pegawai dan Bruto pada Akun Belanja Barang dan Modal.

4. Dalam menyusun RKAKL setiap akun yang menggunakan dana PHLN atau dana pendamping harus mencantumkan kode register kegiatan PHLN tersebut. Kode register harus dienti sesuai dengan kode registrasi di Kementerian Keuangan.
5. Kegiatan PHLN yang dimasukkan ke dalam RKAKL/ DIPA Pusat (Tugas Pembantuan) adalah porsi APBN, sedangkan untuk porsi APBD agar dimasukkan dalam DIPA Daerah.
6. Dalam menyusun RKAKL Kegiatan Kerjasama Luar Negeri di lingkup Ditjen. PSP agar dikonsultasikan ke Bagian Perencanaan SetDitjen PSP (Substansi kegiatan kerjasama luar negeri dapat dikonsultasikan Subbagian Kerjasama, sedangkan Teknis Aplikasi RKAKL PHLN dapat dikonsultasikan ke Subbag Anggaran, telp/fax 021-7820026).

VIII. PENUTUP

Program dan kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA. 2013 diarahkan untuk mendukung pemantapan pengembangan kawasan agribisnis berbasis komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dalam pemantapan pengembangan kawasan, fasilitasi anggaran agar ditekankan kepada prioritas komoditas strategis/unggulan nasional dengan memperhatikan keterkaitan yang sinergis antara sub-sistem hulu, budidaya, hilir serta jasa-jasa penunjang. Selain itu, dalam rangka menggalang dukungan dari instansi terkait diluar Kementerian Pertanian maka dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prasarana dan sarana pertanian di daerah juga ditekankan perlunya koordinasi diantaranya dengan: Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Kehutanan; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Pertanahan Nasional.

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan, maka di dalam merancang kegiatan prasarana dan sarana pertanian di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), diperlukan pemahaman para perencana terhadap kegiatan-kegiatan prioritas dan komponen-komponen kegiatan prasarana dan sarana pertanian dengan memperhatikan potensi dan kondisi daerah. Penyesuaian-penyesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah perlu diakomodir sehingga output perencanaan prasarana dan sarana

pertanian di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi lebih sinkron, terpadu, tajam-terarah ke sasaran, efektif dan efisien.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka perlu digalang kerjasama yang lebih solid, masif dan terpadu antar unit-unit kerja terkait mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota serta peningkatan partisipasi petani/masyarakat secara aktif khususnya dalam proses pelaksanaannya di tingkat lapang, sehingga tercipta suatu sinergi pembangunan yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.